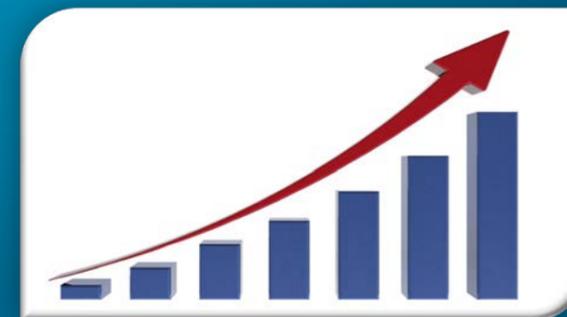


PDRB Kabupaten Aceh Barat Tahun 2008 – 2011 Menurut Penggunaan

DATA

Mencerdaskan Bangsa



Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat

Jl. Sisingamangaraja No. 2, Meulaboh

Telp : (0655) 7009023

Homepage: <http://acehbaratkab.bps.go.id>

Email : bps1107@bps.go.id

**Badan Pusat Statistik
Kabupaten Aceh Barat**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN ACEH BARAT MENURUT PENGGUNAAN TAHUN 2008 - 2011

Nomor Katalog BPS : 9302002.1107

Ukuran Buku : 20 cm x 27 cm

Jumlah Halaman : vii + 64 lembar

Naskah:
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit:
Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan oleh:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Barat menurut penggunaan Tahun 2008-2011 ini merupakan publikasi perdana yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Barat.

Data PDRB tahun 2008 dan 2009 dalam publikasi ini adalah angka tetap, sementara PDRB tahun 2010 adalah angka sementara dan data PDRB tahun 2011 merupakan angka sangat sementara.

Publikasi ini menyajikan tinjauan perkembangan perekonomian yang disajikan secara deskriptif dengan visualisasi grafik dan tabel. Pada bagian lampiran disajikan angka-angka pendapatan regional tahun 2008 hingga 2011 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000 disertai dengan indeks perkembangan. Untuk melengkapi ulasan tabel-tabel tersebut disajikan juga konsep, definisi, serta metodologi penghitungan PDRB menurut jenis penggunaannya.

Kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan publikasi ini dimasa mendatang sangat kami harapkan. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi berupa data-data pendukung sehingga publikasi ini dapat diselesaikan.

Meulaboh, Nopember 2012
Kepala
Badan Pusat Statistik Kab. Aceh Barat

DARA DIAN, SE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL DALAM URAIAN	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL LAMPIRAN	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto	2
1.3. Tujuan dan Kegunaan Statistik Produk Domestik Regional Bruto	6
II. RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI	8
2.1 Ruang lingkup	9
2.2 Metodologi	13
2.3 Metode Perhitungan PDRB Konstan	15
2.4 Konsep dan definisi	16
III. TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN ACEH BARAT	21
3.1. PDRB	22
3.2 Struktur Ekonomi	23
3.3. Pertumbuhan Ekonomi	25
3.4. Laju Implisit	27
3.5. Pendapatan Per Kapita	28
IV. TINJAUAN EKONOMI PER KOMPONEN	30
4.1. Komponen Konsumsi Rumah Tangga	31
4.2. Komponen Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	38
4.3. Komponen Konsumsi Pemerintah	40
4.4. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto	42
4.5. Komponen Perubahan Inventori	44
4.6. Komponen Ekspor Netto	46
LAMPIRAN	50

DAFTAR TABEL DALAM URAIAN

Tabel 3.1	Peranan Komponen Ekonomi dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Sektor, Tahun 2008 - 2011	24
Tabel 3.2	Laju Pertumbuhan Komponen Ekonomi Kabupaten Aceh Barat, Tahun 2008-2011.	27

<http://acehbaratkab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Nilai PDRB Aceh Barat, Tahun 2008-2011	22
Gambar 3.2	Peranan Komponen Ekonomi dalam PDRB, Tahun 2011	23
Gambar 3.3	Nilai PDRB Konstan (Rp. Trilyun) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen) Kab. Aceh Barat tahun 2008-2011	25
Gambar 3.4	Pertumbuhan Ekonomi Tiap Komponen, Tahun 2008-2011	26
Gambar 3.5	Laju Implisit Kabupaten Aceh Barat tahun 2008-2011 (Persen)	28
Gambar 3.6	Pendapatan Regional Per Kapita, Tahun 2008-2011 (Juta Rupiah)	29
Gambar 4.1	PDRB Komponen Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000	32
Gambar 4.2	Peranan dan Laju Pertumbuhan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2008-2011 (Persen)	33
Gambar 4.3	PDRB Sub Komponen Konsumsi Makanan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000	34
Gambar 4.4	Peranan dan Laju Pertumbuhan Sub Komponen Konsumsi Makanan Tahun 2008-2011 (Persen)	35
Gambar 4.5	PDRB Sub Komponen Konsumsi Non Makanan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000	36
Gambar 4.6	Peranan dan Laju Pertumbuhan Sub Komponen Konsumsi Non Makanan Tahun 2008-2011 (Persen)	37
Gambar 4.7	PDRB Komponen Lembaga Swasta Nirlaba Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000	38
Gambar 4.8	Peranan dan Laju Pertumbuhan Komponen Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba Tahun 2008-2011 (Persen)	39
Gambar 4.9	PDRB Komponen Konsumsi Pemerintah Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000	40

Gambar 4.10	Peranan dan Laju Pertumbuhan Komponen Konsumsi Pemerintah Tahun 2008-2011 (Persen)	41
Gambar 4.11	PDRB Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000	42
Gambar 4.12	Peranan dan Pertumbuhan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto Tahun 2008-2011	43
Gambar 4.13	PDRB Komponen Perubahan Inventori Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000	44
Gambar 4.14	Peranan dan Pertumbuhan Komponen Perubahan Inventori Tahun 2008-2011	45
Gambar 4.15	PDRB Komponen Ekspor Netto Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000	47
Gambar 4.16	Peranan dan Laju Pertumbuhan Komponen Ekspor Netto Tahun 2008-2011 (Persen)	48

DAFTAR TABEL LAMPIRAN

Tabel A.	PDRB Kabupaten Aceh Barat Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2011(Jutaan Rupiah)	51
Tabel B.	PDRB Kabupaten Aceh Barat Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008-2011(Jutaan Rupiah)	52
Tabel C.	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Aceh Barat Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2011	53
Tabel D.	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Aceh Barat Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008-2011	54
Tabel E.	Indeks Perkembangan PDRB Kabupaten Aceh Barat Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2011 (Tahun 2000 = 100)	55
Tabel F.	Indeks Perkembangan PDRB Kabupaten Aceh Barat Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008-2011 (Tahun 2000=100)	56
Tabel G.	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Barat Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2011 (Persen)	57
Tabel H.	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Barat Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008-2011 (Persen)	58
Tabel I.	Indeks Implisit PDRB Kabupaten Aceh Barat Menurut Penggunaan Tahun 2008-2011	59
Tabel J.	Laju Implisit Kabupaten Aceh Barat Tahun 2008-2011	60
Tabel K.	Pendapatan Regional dan Angka Per Kapita Kabupaten Aceh Barat Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2011	61
Tabel L.	Pendapatan Regional dan Angka Per Kapita Kabupaten Aceh Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008-2011	62
Tabel M.	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Regional Kabupaten Aceh Barat Tahun 2008-2011 atas dasar harga Berlaku	63
Tabel N.	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Regional Kabupaten Aceh Barat Tahun 2008-2011 atas dasar harga konstan tahun 2000	64

PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Pengertian Produk Domestik Regional Bruto
- Tujuan dan Kegunaan Statistik Produk Domestik Regional Bruto

<http://aceh.bps.go.id>

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi perkembangan perekonomian sangat diperlukan untuk menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi kinerja pemerintahan. Salah satu data statistik yang dibutuhkan untuk kegiatan perencanaan dan evaluasi ekonomi makro adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan tersedianya data PDRB, strategi dan kebijaksanaan pembangunan perekonomian yang telah diambil pemerintah dapat dievaluasi, dan diperbaiki atau dilanjutkan di masa mendatang.

Hakikat pembangunan ekonomi adalah serangkaian kegiatan usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk:

- a. Peningkatan taraf hidup masyarakat
- b. Perluasan kesempatan kerja
- c. Pemerataan pembagian pendapatan masyarakat
- d. Peningkatan hubungan ekonomi regional
- e. Pergeseran ekonomi dan sektor primer ke sektor sekunder dan tersier

Dengan kata lain arah pembangunan ekonomi adalah mengusahakan pendapatan masyarakat naik dengan distribusi yang semakin merata.

Kemudian untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pendapatan masyarakat suatu wilayah perlu disajikan pendapatan regional secara berkala yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan regional/daerah khususnya di bidang ekonomi. Angka-angka pendapatan regional atau PDRB merupakan suatu indikator berupa data agregat yang dapat dipakai untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Sementara itu dalam beberapa buku referensi ditegaskan bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh faktor permintaan daripada penyediaan. Perkembangan yang terjadi sebagai akibat dari perubahan gaya hidup dan perilaku konsumsi dari sebagian masyarakat modern telah mendorong produsen untuk meningkatkan produknya baik secara kuantitas maupun kualitas, yang pada akhirnya mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dibutuhkan parameter untuk memantau perkembangan permintaan atau konsumsi masyarakat luas.

1.2 Pengertian PDRB, Agregat PDRB dan Tahun Dasar

PDRB merupakan neraca makro ekonomi yang dihitung secara konsisten dan terintegrasi berdasarkan konsep, definisi, klasifikasi dan cara penghitungan yang telah disepakati secara internasional. Tujuan menghitung PDRB adalah untuk mengetahui total produksi barang dan jasa pada suatu wilayah selama kurun waktu tertentu.

Nilai PDRB adalah nilai tambah dari total produksi tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan produksi adalah aktifitas ekonomi yang menggunakan sumber daya yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa.

Perubahan nilai PDRB dari waktu ke waktu terjadi karena dua hal, yaitu terjadinya perubahan harga barang dan jasa atau karena terjadinya perubahan volume. Karenanya ada dua macam nilai PDRB disajikan yakni berdasarkan harga konstan dan berdasarkan harga berlaku.

PDRB berdasarkan harga konstan disebut juga PDRB volume atau PDRB ril yang menggambarkan perubahan volume dalam kegiatan ekonomi. Nilai PDRB ini dihitung berdasarkan harga pada periode tahun dasar yaitu tahun 2000. Namun demikian, dalam waktu dekat Badan Pusat Statistik sudah mempersiapkan pergantian tahun dasar dari tahun 2000 menjadi tahun 2010. Adapun yang menjadi dasar pemikiran dalam melakukan perubahan tahun dasar adalah:

- a. Struktur ekonomi selama 10 tahun telah berubah dengan drastis sehingga kurang relevan jika prestasi dan perkembangan ekonomi masih dihitung berdasarkan cerminan struktur lama.
- b. Beberapa sektor mengalami perubahan data dasar, misalnya cakupan komoditi dan kegiatan. Kekuranglengkapan cakupan komoditi dan kegiatan sebelumnya hanya ditampung dalam besaran *mark-up* yang sudah tidak mewakili lagi. Pertambahan kegiatan ini telah diantisipasi sebelumnya tetapi belum diakomodasikan dalam penghitungan Nilai Tambah Bruto (NTB), karena jika dimasukkan hasilnya dapat mengakibatkan pertumbuhan yang melonjak pada tahun mana kegiatan baru tersebut dimasukkan. Untuk itu perubahan tahun dasar merupakan kesempatan yang baik untuk melakukan beberapa perbaikan data dasar dan metode penghitungan.

Sejalan dengan pergeseran tahun dasar Produk Domestik Bruto (PDB) yang dilakukan dalam lingkup nasional, BPS Kabupaten Aceh Barat juga melakukan pergeseran tahun dasar dari tahun 2000 ke tahun 2010. Keseragaman tahun dasar PDRB dan PDB memungkinkan pengguna data dapat melakukan perbandingan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, demikian juga perbandingan antar daerah. Akan tetapi untuk publikasi ini masih menggunakan tahun dasar 2000.

PDRB atas dasar harga berlaku disajikan untuk mengetahui struktur ekonomi suatu daerah dan pergeserannya dari waktu ke waktu. Dikenal ada tiga pendekatan dalam penghitungan PDRB, yaitu produksi, pengeluaran dan pendapatan.

Penghitungan PDRB dengan menggunakan pendekatan produksi yaitu menghitung nilai tambah yang dihasilkan setiap sektor produksi dengan cara mengurangi nilai total output dengan biaya antara yang dikeluarkan untuk menghasilkannya. Nilai tambah tersebut masih merupakan nilai bruto karena di dalamnya masih termasuk nilai

penyusutan barang modal dan nilai pajak tak langsung netto. Ditinjau dari pendekatan produksi, kegiatan ekonomi dapat dikelompokkan dalam sembilan sektor, yaitu:

1. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas dan Air Bersih
5. Bangunan
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
7. Pengangkutan dan Komunikasi
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa

Penghitungan PDRB dengan menggunakan pendekatan Pengeluaran yaitu menghitung PDRB dengan menjumlahkan seluruh permintaan akhir yang terdiri dari:

1. Konsumsi rumah tangga
2. Konsumsi lembaga swasta nirlaba
3. Konsumsi pemerintah
4. Pembentukan modal tetap bruto
5. Perubahan inventori
6. Ekspor
7. Impor

Dikarenakan keterbatasan data, maka untuk penghitungan PDRB menurut penggunaan untuk Kabupaten/Kota hanya menggunakan enam (6) komponen, yaitu:

1. Konsumsi rumah tangga
2. Konsumsi lembaga swasta nirlaba
3. Konsumsi pemerintah
4. Pembentukan modal tetap bruto
5. Perubahan inventori
6. Net Ekspor (Ekspor dikurangi Impor)

Penghitungan PDRB dengan menggunakan pendekatan pendapatan yaitu menghitung PDRB sebagai penjumlahan dari balas jasa faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung netto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan

dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. Ketiga pendekatan penghitungan PDRB tersebut digambarkan dalam diagram 1.

Diagram 1. Persamaan Makro Ekonomi

Ekspor Netto	PDRB Produksi	Pajak	Pajak
Investasi		Pendapatan	Tabungan
Konsumsi Pemerintah			Konsumsi Masyarakat
Konsumsi Masyarakat		Transfer	Transfer

Sebagai salah satu indikator dari data PDRB dapat juga diturunkan beberapa indikator ekonomi penting lainnya, seperti:

1. **Produk Regional Bruto**, yaitu PDRB ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Pendapatan neto itu sendiri merupakan pendapatan atas faktor produksi (tenaga kerja dan modal) milik penduduk Indonesia yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang sama milik penduduk asing yang diperoleh di Indonesia.
2. **Produk Regional Neto atas dasar harga pasar**, yaitu PDRB dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun.
3. **Produk Regional Neto atas dasar biaya faktor produksi**, yaitu produk regional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. Pajak tidak langsung neto merupakan pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Baik pajak tidak langsung maupun subsidi, kedua-duanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual. Pajak tidak langsung bersifat menaikkan harga jual sedangkan subsidi sebaliknya. Selanjutnya, produk regional neto atas dasar biaya faktor produksi disebut sebagai Pendapatan Regional.
4. **Angka-angka per kapita**, yaitu ukuran-ukuran indikator ekonomi sebagaimana diuraikan di atas dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Dalam penyajian statistik PDRB dikenal tiga macam indeks untuk menggambarkan perubahan agregat-agregat pendapatan ini, yaitu indeks perkembangan, indeks berantai dan indeks implisit yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Indeks perkembangan*, diperoleh dengan membagi nilai-nilai pada masing-masing tahun dengan nilai pada tahun dasar, dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun terhadap tahun dasar.
- b. *Indeks berantai*, diperoleh dengan membagi nilai-nilai pada masing-masing tahun dengan nilai pada tahun sebelumnya, dikalikan 100. Jadi angka tahun sebelumnya selalu dianggap 100. Indeks ini menunjukkan tingkat pertumbuhan agregat pendapatan untuk masing-masing tahun dibandingkan tahun sebelumnya.
- c. *Indeks implisit*, diperoleh dengan membagi nilai atas dasar harga berlaku dengan nilai atas dasar harga konstan untuk masing-masing tahunnya, dikalikan dengan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan harga dari agregat pendapatan terhadap harga pada tahun dasar. Selanjutnya bila dari indeks implisit ini dibuat indeks berantainya, akan terlihat tingkat perkembangan harga barang dan jasa setiap tahun terhadap tahun sebelumnya.

1.3 Kegunaan

Kegunaan dari penyusunan publikasi PDRB Kabupaten Aceh Barat tahun 2008-2011 menurut penggunaan adalah:

1. Untuk menyatakan komposisi penggunaan barang dan jasa baik yang dihasilkan dalam daerah maupun yang berasal dari daerah lain termasuk impor dari luar negeri, untuk memenuhi permintaan antara lain sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga
 - b. Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba
 - c. Pengeluaran konsumsi pemerintah
 - d. Pembentukan Modal Tetap Bruto
 - e. Perubahan inventori
 - f. Ekspor neto, yaitu ekspor dikurang impor
2. Mengetahui dan mempelajari fenomena, tatanan maupun perilaku ekonomi makro berbagai pelaku ekonomi seperti perilaku konsumsi masyarakat, pemerintah dan investasi (fisik).
3. Mengetahui informasi tentang surplus atau defisitnya neraca perdagangan barang dan jasa dengan daerah lain
4. Penyajian angka pendapatan regional atas dasar harga konstan akan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah, baik secara menyeluruh maupun sektoral.

5. Nilai pendapatan atau PDRB perkapita secara makro dapat digunakan dalam melakukan analisis perbandingan tingkat kemakmuran suatu daerah dengan daerah lain, serta peningkatannya tiap tahun.
6. Penyajian pendapatan regional atas dasar harga berlaku bersama-sama dengan harga konstan dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat tingkat inflasi/deflasi setiap tahunnya.
7. Sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan di bidang perekonomian daerah.

<http://acehbaratkab.bps.go.id>

RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI

- Ruang Lingkup
 - Metodologi
- Metode Perhitungan PDRB Konstan
 - Konsep Definisi

II. METODOLOGI DAN RUANG LINGKUP

2.1 Ruang Lingkup

2.1.1 Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup semua pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa, dikurangi penjualan neto barang bekas dan sisa yang dilakukan oleh rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung selama satu tahun. Barang dan jasa yang dimaksud antara lain:

1. Segala jenis bahan makanan dan minuman baik mentah maupun bahan jadi, termasuk minuman beralkohol, tembakau dan rokok
2. Perumahan berikut fasilitas perumahan seperti biaya sewa/kontrak rumah, bahan bakar, rekening telepon, listrik dan air, biaya pemeliharaan/perbaikan rumah. Termasuk juga pengeluaran untuk imputasi sewa rumah milik sendiri. Sedangkan pembelian rumah tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga
3. Segala jenis bahan pakaian, pakaian jadi, alas kaki dan tutup kepala
4. Barang tahan lama seperti mobil, motor, kulkas, perabot, TV, alat-alat dapur, perhiasan, mainan anak alat-alat olahraga, binatang peliharaan, tanaman hias dan barang tahan lama lainnya
5. Barang lainnya seperti bahan-bahan untuk kebersihan (sabun mandi, shampo dan sejenisnya), bahan kecantikan (kosmetik, lulur, bedak, lipstik dan sejenisnya), obat-obatan, vitamin, buku alat tulis, surat kabar, kertas pembersih dan sebagainya.
6. Jasa-jasa seperti jasa kesehatan (biaya rumah sakit, dokter, imunisasi dan sejenisnya), jasa pendidikan (biaya sekolah, kursus dan sejenisnya), ongkos dan transportasi, perbaikan kendaraan, biaya hotel, tiket bioskop, tiket tempat rekreasi, biaya pembantu rumah tangga, tukang kebun, penjaga anak dan jasa lainnya

Untuk memperkirakan besarnya konsumsi rumah tangga, digunakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sebagai data pokok. Selanjutnya perkiraan konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, serta penyempurnaan estimasi pengeluaran konsumsi rumah tangga dilakukan melalui proses rekonsiliasi.

Perkiraan besarnya konsumsi rumah tangga didasarkan pada data Susenas, penduduk pertengahan tahun, serta Indeks Harga Konsumen (IHK). Untuk perkiraan konsumsi pada tahun di mana data Susenas belum tersedia digunakan model elastisitas pendapatan terhadap perubahan permintaan barang-barang konsumsi.

2.1.2 Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba

Lembaga swasta yang tidak menerima untung (nirlaba) adalah lembaga/badan swasta yang memberikan pelayanan atau jasa kepada masyarakat seperti organisasi

serikat buruh, persatuan para ahli, organisasi politik, badan keagamaan, lembaga penelitian, pendidikan, kesehatan, dan organisasi-organisasi kesejahteraan masyarakat yang khusus melayani masyarakat dan tidak mengutamakan keuntungan/non komersial.

Adapun ciri-ciri lembaga swasta nirlaba adalah:

1. Lembaga swasta nirlaba pada umumnya lembaga formal, tetapi dapat merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat.
2. Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang mempunyai hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan penting yang diambil lembaga.
3. Setiap anggota lembaga mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi dan tidak berhak menguasai profit atau surplus. Profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga.
4. Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus.
5. Lembaga tidak bertujuan untuk mencari profit sebesar-besarnya, namun dapat menciptakan surplus usaha melalui kegiatan produktifnya. Surplus usaha yang diperoleh akan diinvestasikan kembali ke kegiatan sejenis.
6. Lembaga/badan swasta yang memberikan pelayanan atau jasa kepada masyarakat seperti organisasi serikat buruh, persatuan para ahli, organisasi politik, yang dimaksud dengan non komersial adalah lembaga nirlaba yang menjual jasa layanannya pada tingkat di bawah harga pasar, yaitu harga yang tidak didasarkan atas biaya produksi, bahkan kadangkala layanan yang diberikan dengan cuma-cuma.

2.1.3 Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran konsumsi pemerintah mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan dan belanja barang (termasuk belanja perjalanan, pemeliharaan dan pengeluaran lain yang bersifat rutin) baik dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tidak termasuk penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Pemerintah pusat meliputi seluruh instansi negara, baik yang ada di pusat maupun di kantor wilayah (vertikal) di daerah. Sedangkan pemerintah daerah meliputi pemerintah daerah tingkat I (provinsi), pemerintah daerah tingkat II (Kabupaten/kota) dan pemerintah desa beserta perangkat dinas di masing-masing tingkat pemerintahan tersebut.

2.1.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencakup pembuatan dan pembelian barang-barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru ataupun bekas dari

luar negeri. Barang modal juga diartikan sebagai barang atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi dan biasanya mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih. Barang yang tidak diproduksi kembali, seperti tanah dan cadangan mineral, tidak termasuk dalam PMTB.

Pembentukan modal tetap bruto mencakup:

1. Pembentukan modal tetap berupa bangunan atau konstruksi dari:
 - a. Bangunan tempat tinggal
 - b. Bangunan bukan tempat tinggal
 - c. Bangunan atau konstruksi lainnya seperti: jalan, jembatan, irigasi, pembangkit tenaga listrik dan jaringannya, instalasi telekomunikasi, pemancar TV, pelabuhan, terminal, jaringan pipa untuk minyak, gas dan air, serta monumen.
 - d. Perbaikan besar-besaran dari bangunan tersebut di atas.

Pembentukan modal berupa bangunan/konstruksi dinilai sesuai dengan output bangunan yaitu nilai seluruh pekerjaan bangunan pada satu tahun tertentu tanpa memperhatikan bangunan tersebut sudah selesai atau belum.

2. Pembentukan modal tetap berupa mesin dan alat perlengkapan terdiri dari:
 - a. Alat-alat transpor, seperti kapal laut, kapal terbang, kereta api, bus, truk, motor dan lain-lain,
 - b. Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pertanian,
 - c. Mesin-mesin dan alat perlengkapan untuk industri, listrik dan pertambangan, mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pembuatan jalan, jembatan dan lain-lain,
 - d. Mesin-mesin dan perabot untuk perlengkapan kantor, toko, hotel, restoran, rumah dan lain-lain.

Mesin-mesin dan alat perlengkapan yang sedang dalam proses pembuatan tidak dimasukkan dalam perhitungan pembentukan modal tetap bruto, tetapi merupakan stok dari produsennya.

3. Perluasan perkebunan dan penanaman baru untuk tanaman keras. Yang dimaksud dengan tanaman keras adalah tanaman yang hasilnya baru akan diperoleh setelah berumur satu tahun atau lebih. Termasuk juga pengeluaran yang dilakukan oleh perkebunan besar selama perkebunan itu belum mendatangkan hasil (berproduksi) dan kegiatan penanaman kembali (reboisasi) yang dilakukan oleh perusahaan pemerintah sendiri.
4. Penambahan ternak yang khusus dipelihara untuk diambil susu dan bulunya atau untuk dipakai tenaganya dan sebagainya, kecuali ternak yang dipelihara untuk dipotong.

5. Margin pedagang atau makelar, jasa pelayanan dan ongkos pemindahan hak milik dalam transaksi jual beli tanah, sumber mineral, hak pengusaha hutan, hak paten, hak cipta dan barang modal bekas tercakup dalam PMTB.

2.1.5 Perubahan Inventori

Perubahan inventori dihitung dengan cara residual atau membuang selisih atau perbedaan antara total PDRB sektoral dengan total PDRB penggunaan.

Dengan demikian pada komponen ini selain mencakup perubahan stok atau inventori termasuk juga diskrepansi statistik. Perubahan inventori merupakan komponen penting dalam penghitungan investasi. Klasifikasi inventori menurut jenis barang dapat dibedakan atas:

1. Barang inventori menurut sektor seperti produk atau hasil dari perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih serta konstruksi serta bangunan
2. Berbagai jenis bahan baku dan penolong, yaitu semua bahan, komponen atau persediaan yang diperoleh untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi
3. Barang jadi, yaitu barang yang telah selesai diproses tapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang-barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli
4. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai)
5. Ternak untuk tujuan dipotong
6. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual
7. Pengadaan barang-barang oleh unit perdagangan untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan
8. Stok pada pemerintah yang mencakup barang-barang strategis, seperti beras, kedelai, gula pasir dan gandum

2.1.6 Ekspor dan Impor Barang dan Jasa

Ekspor dan impor merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antara penduduk Aceh Barat dengan penduduk di luar Aceh Barat dan dengan penduduk luar negeri, yang meliputi ekspor dan impor adalah barang, jasa pengangkutan, jasa asuransi, jasa komunikasi, jasa pariwisata, dan jasa lainnya.

Yang dimaksud dengan ekspor adalah pembelian langsung atas barang dan jasa di wilayah Aceh Barat oleh penduduk luar Aceh Barat dan penduduk luar negeri. Sebaliknya

pembelian langsung barang dan jasa di luar Aceh Barat dan di luar negeri oleh penduduk Aceh Barat, dimasukkan sebagai impor.

Data yang digunakan untuk perhitungan ekspor dan impor diperoleh dari beberapa sumber yaitu: Statistik Ekspor dan impor BPS, Indeks Perdagangan Besar (IHPB) dari BPS, kurs rupiah terhadap rupiah dari Bank Indonesia, Departemen Pertambangan dan Energi dan dinas/instansi terkait lainnya.

2.2 Metode Penghitungan dan Sumber Data

2.2.1 Konsumsi Rumah Tangga

a. Makanan

Model yang digunakan untuk kelompok makanan adalah fungsi eksponensial. Model ini diperoleh berdasarkan asumsi bahwa setiap penambahan pendapatan akan menyebabkan pertambahan konsumsi, tetapi pada suatu saat (titik jenuh) konsumsi tersebut mulai menurun, dengan bentuk kurva seperti parabola. Bentuk fungsi eksponensial tersebut adalah:

$$Q_i = a \cdot Y_i^b$$

Dimana:

Q_i = rata-rata konsumsi per kapita sebulan (kuantum)

Y_i = pendapatan per kapita sebulan (rupiah)

a = konstanta

b = koefisien elastisitas

i = kelompok pendapatan perbulan

b. Bukan Makanan

Model yang digunakan untuk kelompok bukan makanan adalah regresi linier. Artinya setiap kenaikan pendapatan akan selalu diikuti oleh penambahan permintaan konsumsi kelompok bukan makanan. Model yang digunakan sebagai berikut:

$$Q_i = a + b \cdot Y_i$$

Dimana:

Q_i = rata-rata konsumsi per kapita sebulan (kuantum)

Y_i = pendapatan per kapita sebulan (rupiah)

a = konstanta

b = koefisien elastisitas

i = kelompok pendapatan perbulan

2.2.2 Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba

Konsumsi lembaga swasta nirlaba meliputi semua pengeluaran untuk pembelanjaan barang dan jasa, pembayaran upah dan gaji, penerimaan transfer, penyusutan dan pajak

tak langsung netto dikurangi dengan penjualan barang bekas. Pada umumnya sumber pembiayaan dari lembaga ini berasal dari sumbangan dan bantuan perorangan, masyarakat, organisasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dan pemerintah. Apabila bantuan dana dan pengawasan sepenuhnya atau sebagian besar dari pemerintah maka lembaga ini dimasukkan ke dalam konsumsi pemerintah.

2.2.3 Konsumsi Pemerintah

Data dasar yang dipakai adalah realisasi belanja rutin dan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Realisasi APBN diperoleh dari Direktorat Jendral Anggaran Departemen Keuangan untuk perhitungan konsumsi pemerintah pusat.

Sedangkan untuk perhitungan konsumsi pemerintah daerah menggunakan data realisasi pengeluaran APBD dari mulai tingkat provinsi sampai dengan tingkat desa yang dikumpulkan oleh BPS yang bersumber dari Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Aceh baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Perkiraan pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2000 untuk belanja pegawai dihitung dengan cara ekstrapolasi menggunakan penimbang jumlah pegawai negeri. Sedangkan untuk belanja barang digunakan cara deflasi yaitu dengan menggunakan IHPB umum tanpa ekspor.

2.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Metode yang dipakai dalam penghitungan PMTB adalah pendekatan institusi. Menurut institusi, PMTB terdiri dari PMTB pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta usaha swasta lainnya (termasuk usaha rumah tangga).

2.2.5 Perubahan Inventori

Perubahan inventori merupakan selisih antara nilai posisi inventori pada akhir tahun dikurangi dengan nilai posisi pada awal tahun pada waktu yang sama. Oleh karena itu dalam pengukurannya perubahan inventori dapat bertanda positif atau negatif. Positif dalam arti terjadi penambahan barang inventori sedangkan negatif apabila terjadi pengurangan barang inventori dari persediaan (stok) yang ada.

2.2.6 Ekspor dan Impor Barang dan Jasa

Ekspor barang dinilai menurut harga *free on board (fob)*, sedangkan impor menurut *cost insurance freight (cif)*. Kurs dollar AS (dari Bank Indonesia) untuk ekspor menggunakan rata-rata kurs beli yang tertimbang dengan nilai nominal transaksi ekspor

bulanan, sedangkan untuk impor menggunakan rata-rata kurs jual yang tertimbang dengan nilai nominal transaksi impor bulanan.

Sumber data yang digunakan untuk estimasi nilai ekspor dan impor adalah Survei Ekspor Impor dari BPS, sedangkan untuk ekspor jasa diperoleh dari neraca pembayaran yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Ekspor dan impor atas dasar harga konstan 2000 penghitungannya dilakukan dengan cara deflasi, menggunakan IHPB yang bersesuaian.

2.3 Metodologi Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan secara berkelanjutan dan berkala sangat berguna untuk mengetahui perkembangan sektor ekonomi secara riil. BPS telah menetapkan tahun 2000 sebagai tahun dasarnya. Untuk menghitung nilai tambah atas dasar harga konstan dikenal empat penghitungan yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

2.3.1 Revaluasi

Metode revaluasi dilakukan dengan cara menilai produksi dan biaya antara masing-masing tahun dengan harga tahun dasar 2000 dan hasilnya merupakan output dan biaya antara atas dasar harga konstan 2000. Selanjutnya nilai tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil selisih antara output dan biaya antara hasil penghitungan di atas.

Metode ini sangat sulit dilakukan terhadap biaya antara yang digunakan, karena mencakup komponen input yang terlalu banyak dan juga data harga kurang tersedia. Karena itu biaya antara atas dasar harga konstan diperoleh dari perkalian antara output atas dasar harga konstan masing-masing tahun dengan rasio tetap biaya antara terhadap output pada tahun dasar.

2.3.2 Ekstrapolasi

Dengan metode ekstrapolasi nilai tambah masing-masing tahun atas dasar harga konstan tahun 2000 diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar 2000 dengan indeks produksi sebagai ekstrapolator dapat merupakan indeks dari masing-masing produksi yang dihasilkan ataupun indeks dari indikator produksi seperti tenaga kerja, jumlah perusahaan dan lainnya yang dianggap cocok dengan jenis kegiatan yang dihitung.

Ekstrapolasi dapat juga dilakukan terhadap perhitungan output atas dasar harga konstan, kemudian dengan menggunakan rasio tetap nilai tambah terhadap output akan diperoleh perkiraan nilai tambah atas dasar harga konstan.

2.3.3 Deflasi

Untuk memperoleh nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 dapat dilakukan dengan metode deflasi yaitu dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku masing-masing tahun dengan indeks harga. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator biasanya merupakan Indeks Harga Konsumen, Indeks Harga Perdagangan Besar dan sebagainya.

Indeks harga di atas dapat pula dipakai sebagai inflator dalam keadaan dimana nilai tambah atas dasar harga yang berlaku justru diperoleh dengan mengalikan nilai tambah atas dasar harga konstan dengan indeks harga tersebut.

2.3.4 Deflasi Berganda

Yang dideflasi dalam deflasi berganda ini adalah output dan biaya antaranya, sedangkan nilai tambah diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara hasil deflasi tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk penghitungan output atas dasar harga konstan biasanya merupakan Indeks Harga Produsen atau Indeks Perdagangan Besar sesuai dengan cakupan komoditasnya, sedangkan indeks harga untuk biaya antara adalah indeks harga dari komponen input terbesar.

Metode ini tidak banyak digunakan dalam perhitungan karena kenyataannya sangat sulit melakukan deflasi terhadap biaya antara, disamping karena komponennya terlalu banyak juga karena indeks harganya belum tersedia secara baik. Penghitungan komponen penggunaan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan juga dilakukan dengan menggunakan cara-cara di atas, tetapi mengingat data yang tersedia kurang lengkap maka cara deflasi dan ekstrapolasi lebih banyak dipakai.

2.4 Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi menjadi amat penting untuk memahami lebih lanjut mengenai data yang tersedia. Arti, wujud fisik, karakteristik, batasan dan sifat kegiatan tentang eksistensi, perubahan dan perpindahan suatu barang dan jasa harus tercermin jelas dalam konsep dan definisi. Definisi yang berbeda akan menghasilkan data yang berbeda pula. Perlu diingat bahwa konsep dan definisi yang termaktub dalam buku ini pada dasarnya untuk tujuan penyusunan neraca regional.

Aset (Harta)

Pemilikan atas berbagai macam harta baik berwujud maupun tidak berwujud (*tangible* dan *intangible*) yang dimiliki oleh perorangan, perusahaan atau pemerintah. Secara praktis biasanya dinilai dalam bentuk moneter.

Biaya Antara

Input yang dipergunakan habis dalam proses produksi dan terdiri dari barang tidak tahan lama dan jasa baik yang dibeli dari pihak lain ataupun yang diproduksi sendiri.

Bunga Neto

Selisih antara bunga diterima dan bunga yang dibayar atas pinjaman (finansial) yang diberikan.

Ekspor Barang dan Jasa

Meliputi seluruh transfer dan penjualan barang dan jasa dari residen suatu negara ke residen negara lainnya dilakukan baik dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam prakteknya, ekspor terdiri dari barang dagangan dan barang lainnya yang keluar melalui daerah batas pabean atau wilayah domestik suatu negara, termasuk pembelian langsung di negara tersebut oleh perwakilan negara asing dan orang-orang non residen. Karena ekspor barang dagangan suatu negara dinilai atas dasar fob, maka nilai ekspor tidak termasuk pengapalan dan asuransi sampai pada negara tujuan.

Faktor Produksi

Mencakup faktor-faktor yang terlibat langsung dalam suatu proses produksi baik secara langsung maupun tidak langsung seperti tanah, tenaga kerja, modal dan keahlian.

Faktor Pendapatan dari Luar

Merupakan pendapatan/kompensasi yang diterima oleh faktor produksi, atas keterlibatannya dalam suatu proses produksi di luar batas wilayah domestik.

Pajak Tidak Langsung Neto merupakan Pajak Tidak Langsung dikurangi subsidi.

Impor Barang dan Jasa

Meliputi seluruh transfer dan pembelian barang dan jasa dari residen suatu negara ke residen negara lainnya yang dilakukan baik dalam wilayah domestik maupun di luar negeri. Pada prakteknya, impor terdiri dari barang dagangan dan barang lainnya yang melewati batas pabean atau wilayah domestik suatu negara, termasuk pembelian langsung oleh pemerintah, penduduk dan perwakilan negara tersebut di luar negeri. Karena impor barang-barang dagangan dinilai dengan cif, maka nilai barang termasuk biaya pengangkutan dan asuransi.

Imputasi Jasa

Merupakan perkiraan atas nilai output jasa yang dihasilkan, sebagai contoh imputasi jasa bank, jasa asuransi, jasa dana pensiun dan sebagainya.

Investasi

Dana yang disisihkan untuk ditanamkan sebagai modal dalam usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan harapan modal tersebut akan kembali dalam beberapa tahun.

Kapital

Faktor produksi yang diciptakan oleh keahlian manusia dari sumber alam yang tersedia dan digunakan untuk menciptakan pendapatan seperti: mesin, peralatan, pabrik, dan sebagainya (barang modal).

Margin Perdagangan dan Biaya Transport

Merupakan selisih nilai transaksi pada tingkat harga pembeli dengan tingkat harga produsen. Selisih ini mencakup keuntungan pedagang, baik pedagang besar maupun pedagang eceran dan biaya transport yang timbul dalam menyalurkan barang dari produsen kepada pembeli.

Input Primer

Disebut juga nilai tambah bruto, terdiri dari balas jasa tenaga kerja, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung neto.

Output Domestik

Nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi tanpa membedakan pelaku produksinya di wilayah domestik tertentu.

Pelengkap (*Mark-up*)

Merupakan besaran persentase tertentu yang ditambahkan terhadap suatu bialangan estimasi yang fungsinya untuk melengkapi data yang tidak lengkap.

Penyusutan

Yang dimaksudkan adalah penyusutan barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi.

Pembentukan Modal Tetap

Meliputi pembuatan dan pembelian barang modal baru baik dari dalam negeri maupun impor, termasuk barang modal bekas dari luar negeri. Pembentukan modal tetap yang dicakup hanyalah yang dilakukan oleh sektor-sektor ekonomi di dalam negeri (domestik).

Permintaan Antara

Merupakan permintaan barang dan jasa untuk memenuhi proses produksi.

Permintaan Akhir

Merupakan permintaan barang dan jasa untuk memenuhi konsumsi akhir, pembentukan modal dan ekspor.

<http://acehbaratkab.bps.go.id>

TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN ACEH BARAT

- Nilai PDRB
- Struktur Ekonomi
- Pertumbuhan Ekonomi
- Laju implisit
- Pendapatan Per Kapita

III. TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN ACEH BARAT

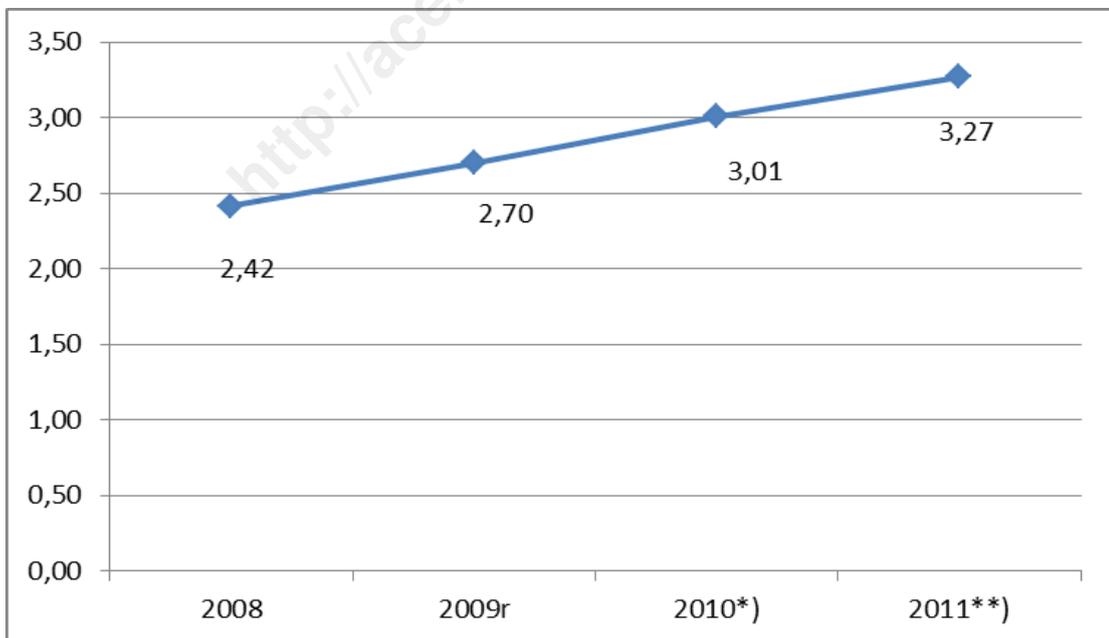
3.1. Nilai PDRB

Seperti halnya PDRB Aceh Barat menurut lapangan usaha, PDRB Aceh Barat menurut penggunaan juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari 2,42 trilyun rupiah pada tahun 2008 menjadi 2,70 trilyun rupiah pada tahun 2009. Kemudian di tahun 2010 angka ini kembali bertambah menjadi 3,01 trilyun rupiah, bahkan pada tahun 2011 PDRB Aceh Barat telah mencapai 3,27 trilyun rupiah.

PDRB Aceh Barat menurut penggunaan selama empat tahun terakhir ini merupakan yang tertinggi di kawasan Pantai Barat Selatan Aceh. Bersumber dari BPS Propinsi Aceh, angka PDRB Aceh Jaya dan Nagan Raya sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten ini hanya sebesar 1,08 dan 1,77 trilyun rupiah. Sedangkan PDRB Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan masing-masing senilai 1,68 dan 2,71 trilyun rupiah. Bahkan PDRB Simeulue, Aceh Singkil dan Subulussalam malah hanya dibawah 1 trilyun rupiah. Besaran PDRB ini merupakan cerminan kemajuan ekonomi suatu wilayah.

Gambar 3.1

Perkembangan PDRB Aceh Barat Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2008-2011
(Trilyun Rupiah)

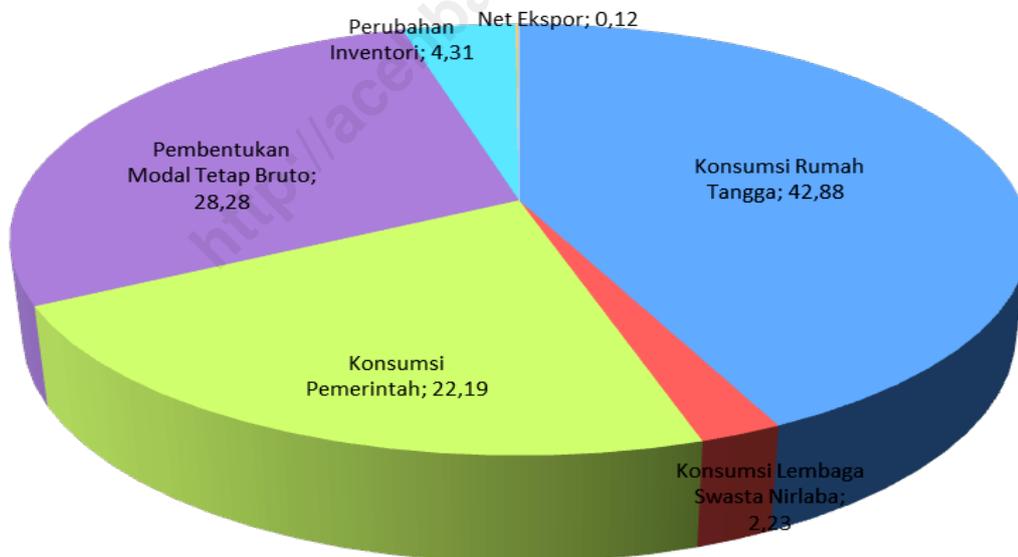


3.2 Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh masing-masing komponen ekonomi terhadap pembentukan nilai PDRB menurut penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Periode tahun 2008 hingga tahun 2011, struktur ekonomi Kabupaten Aceh Barat relatif tidak mengalami perubahan. Terdapat tiga komponen utama yang menopang perekonomian Kabupaten Aceh Barat yaitu komponen konsumsi rumah tangga, komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan komponen konsumsi pemerintah.

Komponen-komponen ini sangat dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Aceh Barat menurut penggunaan. Pada tahun 2011 komponen konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi sebesar 44,18 persen terhadap total PDRB. Kemudian diikuti oleh komponen PMTB sebesar 27,17 persen pada posisi kedua, dan komponen konsumsi pemerintah pada posisi ketiga dengan nilai sebesar 20,73 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Aceh Barat sebagian besar dibelanjakan untuk ketiga komponen pengeluaran diatas.

Gambar 3.2
Peranan Komponen Ekonomi dalam PDRB Tahun 2011 (Persen)



Jika dilihat periode 2008-2011 komponen konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan kontribusi setiap tahunnya. Pada tahun 2008 komponen ini memberikan kontribusi sebesar 38,74 terhadap PDRB Aceh Barat. Kemudian pada tahun 2011 kontribusi yang diberikan mencapai 42,88 persen. Besarnya konsumsi penduduk seyogyanya dapat ditekan, salah satunya dengan mengontrol laju pertumbuhan penduduk melalui pengendalian jumlah kelahiran. Selain itu gaya hidup masyarakat Aceh Barat yang

terkenal konsumtif juga harus berusaha dirubah. Bila konsumsi masyarakat terus melonjak maka akan membatasi gerak komponen pembentukan modal tetap bruto dan perubahan inventori. Padahal kedua komponen ini justru lebih menguntungkan daerah sebagai modal pembangunan.

Komponen yang memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap total PDRB tahun 2011 menurut penggunaan adalah komponen pembentukan modal tetap bruto. Jika dilihat periode tahun 2008 sampai 2011, peranan komponen ini mengalami penurunan secara bertahap dari nilai 32,91 persen pada tahun 2008 menjadi 28,28 persen pada tahun 2011. Penurunan kontribusi ini lebih disebabkan berakhirnya masa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dan gelombang tsunami tahun 2004 silam. Seperti kita ketahui kegiatan konstruksi dan alat berat penunjang kegiatan konstruksi sangat dominan pada masa-masa tersebut.

Komponen konsumsi pemerintah merupakan alokasi belanja terbesar ketiga dalam PDRB menurut penggunaan. Peranan komponen ini menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun-ketahun. Hal ini dapat dimaklumi mengingat alokasi belanja pegawai yang terus bertambah, juga pemberian remunerasi kepada beberapa instansi vertikal. Pada tahun 2008, komponen ini menyedot dana 21,57 persen dari PDRB. Sedangkan pada tahun 2011, komponen ini menyerap 22,19 persen nilai PDRB. Komponen ekonomi lainnya hanya memberikan kontribusi dibawah 10 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Peranan Penggunaan dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Komponen, Tahun 2008-2011 (persen)

Komponen	2008	2009	2010*	2011**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga	38,74	42,77	42,88	42,88
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	2,90	2,61	2,25	2,23
3. Konsumsi Pemerintah	21,57	22,11	22,11	22,19
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	32,91	28,01	28,27	28,28
5. Perubahan Inventori	3,82	4,37	4,37	4,31
6. Net Ekspor	0,06	0,14	0,12	0,12
PDRB Aceh Barat	100,00	100,00	100,00	100,00

*) angka sementara

***) angka sangat Sementara

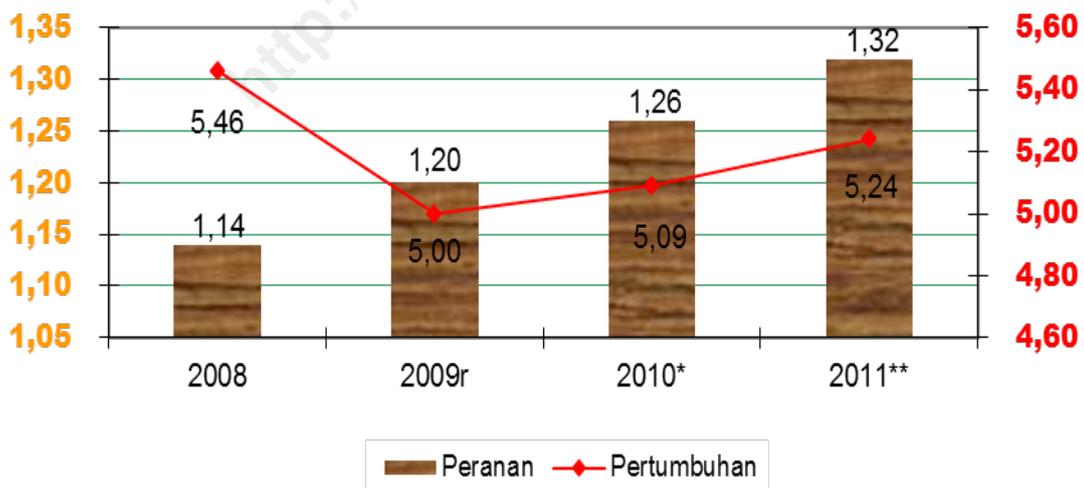
3.3 Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB menurut penggunaan atas dasar harga konstan (ADHK) yang disajikan secara berkala setiap tahunnya. Perbandingan nilai PDRB ADHK tahun berjalan dengan tahun sebelumnya merupakan angka laju pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan tersebut.

Berdasarkan harga konstan 2000, selama kurun waktu 2008-2011 nilai PDRB konstan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat semakin meningkat. Pada tahun 2008 dan 2009 pertumbuhan ekonomi Aceh Barat mencapai 5,46 dan 5,00 persen dengan PDRB konstan yang terbentuk mencapai 1,14 dan 1,20 trilyun rupiah. Nilai ini tumbuh lagi sebesar 5,09 persen tahun 2010 dan 5,24 persen pada tahun 2011 sehingga PDRB Aceh Barat mencapai angka 1,26 dan 1,32 trilyun rupiah di dua tahun terakhir.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 disebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi komponen pembentukan nilai tambah bruto (yang terkait erat dengan kegiatan konstruksi) seiring berakhirnya masa rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh Barat. Pada tahun-tahun selanjutnya, meningkatnya komponen pembentukan modal tetap bruto (pembangunan jalan dan jembatan) membuat pertumbuhan ekonomi Aceh Barat semakin tinggi setiap tahunnya. Tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat Periode tahun 2008-2011 dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3
Nilai PDRB (Rp. Trilyun) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2008-2011



Komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi sepanjang empat tahun terakhir adalah komponen ekspor netto. Komponen ini merupakan selisih antara komponen ekspor dengan komponen impor. Komoditi unggulan yang diekspor oleh Kabupaten Aceh Barat adalah karet dan kelapa sawit. Sedangkan komoditi yang diimpor oleh Aceh Barat berupa komoditi makanan jadi, sandang, dan material bangunan. Bila

komponen ekspor netto ini bernilai negatif, berarti Aceh Barat lebih banyak mengimpor barang. Sebaliknya bila komponen ini bernilai positif maka Kabupaten Aceh Barat ini lebih diuntungkan karena komoditi yang diekspor lebih banyak daripada impor. Konsep ekspor dan impor disini meliputi barang yang diperdagangkan antar kabupaten, antar propinsi dan antar negara.

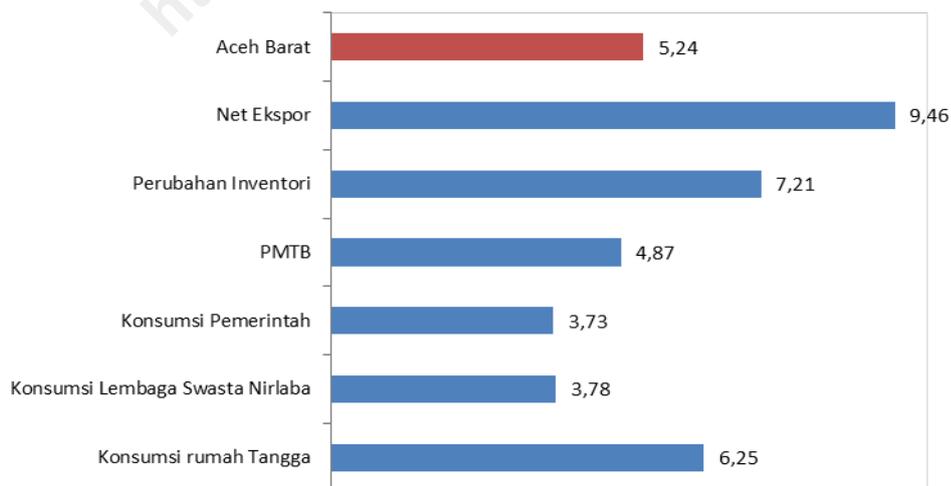
Pada tahun 2011, laju pertumbuhan komponen ekspor netto ini mencapai 9 persen. Angka pertumbuhan yang terbilang tinggi ini dikarenakan tingginya produksi komoditi karet dan kelapa sawit di Aceh barat. Hasil produksi ini kemudian diekspor, baik keluar negeri maupun keluar daerah. Komponen ini terus berkembang selama empat tahun terakhir sehingga pertumbuhan ekonomi yang terbentuk selalu bernilai positif.

Komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi kedua adalah komponen perubahan inventori. Pertumbuhan ekonomi komponen ini di tahun 2011 tercatat sebesar 7,21 persen. Adanya penimbunan bahan untuk pelaksanaan proses pembangunan serta banyaknya persediaan barang dagangan dengan banyaknya dibuka swalayan baru menyebabkan selama kurun waktu empat tahun terakhir komponen ini terus tumbuh positif, bahkan mampu tumbuh belasan persen di tahun 2008-2009.

Komponen konsumsi rumah tangga juga mampu tumbuh diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat. laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan pola konsumsi masyarakat yang masih konsumtif menyebabkan di tahun 2011 komponen ini tumbuh sebesar 6,25 persen. Selama tahun 2008-2011 komponen ini tumbuh cukup stabil di angka 6-7 persen.

Gambar 3.4

Pertumbuhan ekonomi tiap Komponen di Aceh Barat Tahun 2011 (Persen)



Mengacu pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2011, terdapat tiga komponen yang mengalami pertumbuhan dibawah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat yang sebesar 5,24 persen. Komponen-komponen tersebut yaitu

komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (4,87%), komponen konsumsi lembaga swasta nirlaba (3,78%) dan komponen konsumsi pemerintah (3,73%). Untuk lebih rinci dapat dilihat di tabel 3.2

Tabel 3.2

Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Aceh Barat, Tahun 2008-2011 (Persen)

Komponen	2008	2009	2010*	2011**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga	7,86	7,51	6,87	6,25
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	-19,99	-1,49	-6,96	3,78
3. Konsumsi Pemerintah	3,91	6,34	3,05	3,73
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,90	-0,02	4,59	4,87
5. Perubahan Inventori	11,71	16,72	9,98	7,21
6. Net Ekspor	15,73	28,55	22,93	9,46
PDRB Aceh Barat	5,46	5,00	5,09	5,24

3.4 Laju Implisit

Perbedaan PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan diatas disebabkan adanya kenaikan harga yang terjadi setiap tahunnya. Kenaikan harga barang tersebut tercermin dari angka indeks implisit. Sedangkan laju kenaikan harga barang disebut laju implisit. Bila laju implisit ini bernilai positif berarti terjadi kenaikan harga barang yang beredar (inflasi). Sebaliknya bila laju implisit ini bernilai negatif maka mengindikasikan adanya penurunan harga barang (deflasi).

Terdapat dua kota pencatat inflasi di Propinsi Aceh yang dijadikan rujukan kabupaten/kota lain, yaitu Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2013 Kabupaten Aceh Barat telah direncanakan menjadi Kabupaten ketiga pencatat inflasi di propinsi ini. Angka inflasi di kedua kota inilah yang dapat dijadikan bahan perbandingan terhadap laju implisit Aceh Barat.

Pada tahun 2009, rata-rata kenaikan harga barang dalam Kabupaten Aceh Barat adalah sebesar 6,46 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding laju inflasi barang di pasaran pada Kota Banda Aceh (3,50 persen) dan Kota Lhokseumawe (3,96). Hal ini dapat dimaklumi karena pada tahun tersebut semua harga barang dan jasa dalam Kabupaten Aceh Barat sangat tinggi.

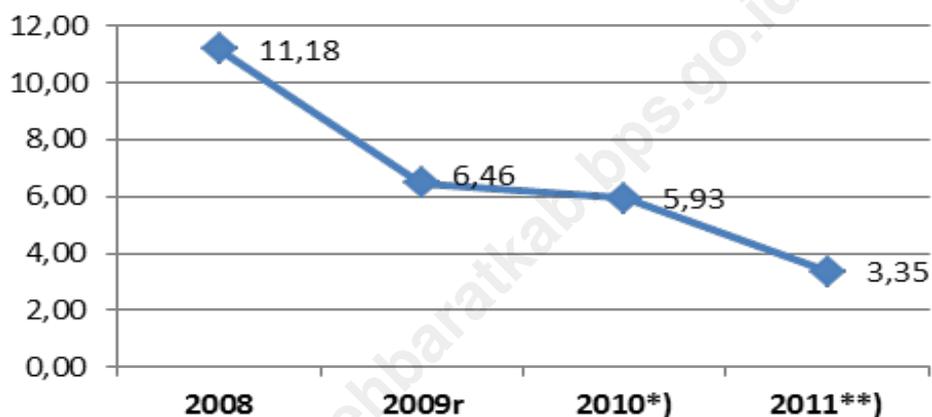
Berakhirnya masa rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh Barat membuat kenaikan harga barang di kabupaten ini pada tahun 2010 dapat lebih terkontrol. Hal ini membuat

laju indeks implisit kabupaten ini dapat melambat ke level 5,93 persen. Angka ini tidak jauh berbeda dengan dua kota pencatat inflasi di Aceh. Laju inflasi Kota Banda Aceh dan Lhokseumawe adalah sebesar 4,64 dan 7,19 persen.

Demikian juga dengan tahun 2011, pada tahun ini inflasi semakin dapat ditekan yaitu hanya 3,35 persen. Mendekati laju inflasi kota Banda Aceh (3,25 persen) dan Kota Lhokseumawe (3,55 persen). Inflasi memang tidak dapat dihindari, ini merupakan efek dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Pemerintah hanya dapat mengontrol agar kenaikan harga yang terjadi jangan terlalu tinggi sehingga tidak terlalu menyulitkan masyarakat ekonomi bawah.

Gambar 3.6

Laju Implisit Kabupaten Aceh Barat tahun 2008-2011 (Persen)



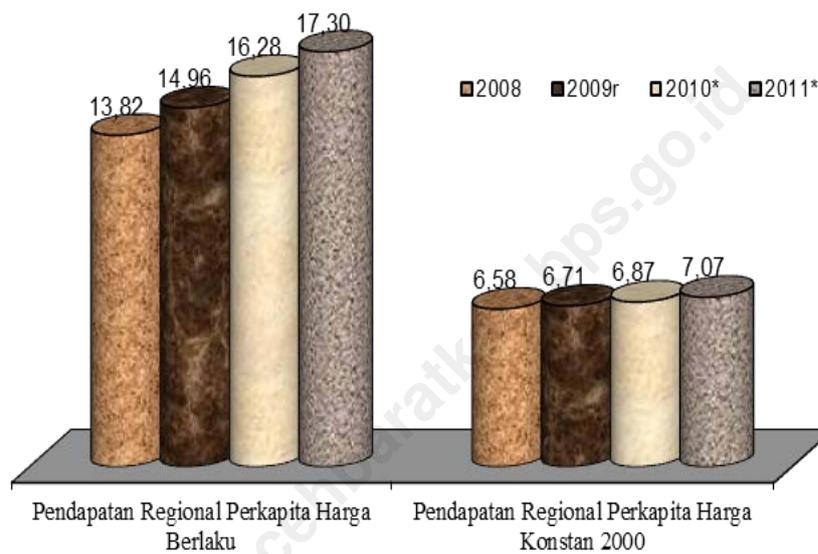
3.5 Pendapatan Per Kapita

Menurut konsep dan definisi yang digunakan, pendapatan per kapita adalah hasil bagi antara pendapatan regional atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pendapatan regional per kapita dapat dilihat atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Secara makro pendapatan regional per kapita dapat dijadikan ukuran tingkat kemakmuran suatu daerah.

Pada tahun 2011 pendapatan regional per kapita penduduk Kabupaten Aceh Barat tercatat sebesar 17,30 juta rupiah per tahun, atau mengalami peningkatan sebesar 1 juta rupiah dari tahun 2010 yang nilainya mencapai 16,28 juta rupiah. Angka 17,30 juta rupiah ini menggambarkan rata-rata pendapatan penduduk per jiwa selama setahun. Jika rumah tangga terdiri dari 4 orang anggota (ayah, ibu dan dua orang anak), diperkirakan pendapatan rumah tangga sebesar 69 juta rupiah pertahun atau 5 juta rupiah per bulan. Pada kenyataannya masih terdapat rumah tangga di daerah ini yang mempunyai pendapatan dibawah itu.

Hal ini dikarenakan pendapatan per kapita merupakan nilai rata-rata dari total pendapatan daerah dibagi jumlah penduduk, yang belum tentu dinikmati oleh seluruh penduduk. Jika pendapatan per kapita suatu daerah semakin tinggi, namun kenyataan masih terdapat penduduk yang berpenghasilan rendah, maka distribusi pendapatan penduduk wilayah tersebut masih belum merata.

Gambar 3.7
Pendapatan Regional Per Kapita, Tahun 2008-2011 (Juta Rupiah)



Secara riil (tanpa dipengaruhi oleh fluktuasi harga/inflasi) pendapatan per kapita dapat dilihat dari PDRB harga konstan. Perkembangan pendapatan per kapita penduduk Aceh Barat selama kurun waktu empat tahun terakhir baru berkisar antara 6,58 juta rupiah (tahun 2008) sampai 7,07 juta rupiah (tahun 2011). Hal ini menggambarkan secara riil ternyata pendapatan penduduk setiap tahunnya hanya mengalami sedikit peningkatan.

Dapat disimpulkan bahwa walaupun terjadi peningkatan pendapatan per kapita secara harga berlaku, tetapi kenaikan harga pada tahun tersebut juga tinggi, maka kenaikan pendapatan per kapita tidak akan terlalu membantu terhadap perbaikan ekonomi masyarakat.

TINJAUAN EKONOMI MENURUT KOMPONEN

- Komponen Konsumsi Rumah Tangga
- Komponen Konsumsi Lembaga Swasta nirlaba
- Komponen Konsumsi Pemerintah
- Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto
- Komponen Perubahan Inventori
- Komponen Ekspor Netto

<http://acchadapublishing.com>

IV. TINJAUAN EKONOMI MENURUT KOMPONEN

Tinjauan ekonomi Kabupaten Aceh Barat menurut komponen akan memberikan gambaran pola konsumsi terhadap pembentukan PDRB dan komponen dominan pada PDRB penggunaan tersebut. Secara lengkap tinjauan per komponen PDRB Aceh Barat selama kurun waktu 2008 hingga 2011 adalah sebagai berikut:

4.1 Komponen Konsumsi Rumah Tangga

Perkembangan nilai konsumsi rumah tangga di Aceh Barat selama empat tahun terakhir amat pesat. Pada tahun 2008, total konsumsi rumah tangga di Aceh Barat mencapai 935 milyar rupiah. Artinya, sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, seluruh rumah tangga di Aceh Barat mengkonsumsi kebutuhan makanan dan non makanan dengan total nilai 935 milyar rupiah. Dengan jumlah penduduk sebesar 164.360 jiwa, bisa dikatakan bahwa rata-rata konsumsi masyarakat Aceh Barat selama tahun 2008 adalah 5,69 juta rupiah per tahun atau senilai 474 ribu rupiah per bulan. Bila diasumsikan satu rumah tangga terdiri atas empat anggota rumah tangga (ayah, ibu dan dua orang anak) maka selama tahun 2008, rata-rata konsumsi rumah tangga di Aceh Barat sebanyak 1,9 juta rupiah per bulan.

Selanjutnya di tahun 2009 konsumsi rumah tangga ini kembali bertambah menjadi 1,15 milyar. Dengan jumlah penduduk di tahun tersebut sebesar 169.111 jiwa, maka rata-rata konsumsi penduduk per tahun mencapai 6,83 juta rupiah atau senilai 569 ribu rupiah per bulannya dan 2,28 juta rupiah per rumah tangga per bulan. Dengan asumsi setiap rumah tangga terdiri dari empat anggota rumah tangga.

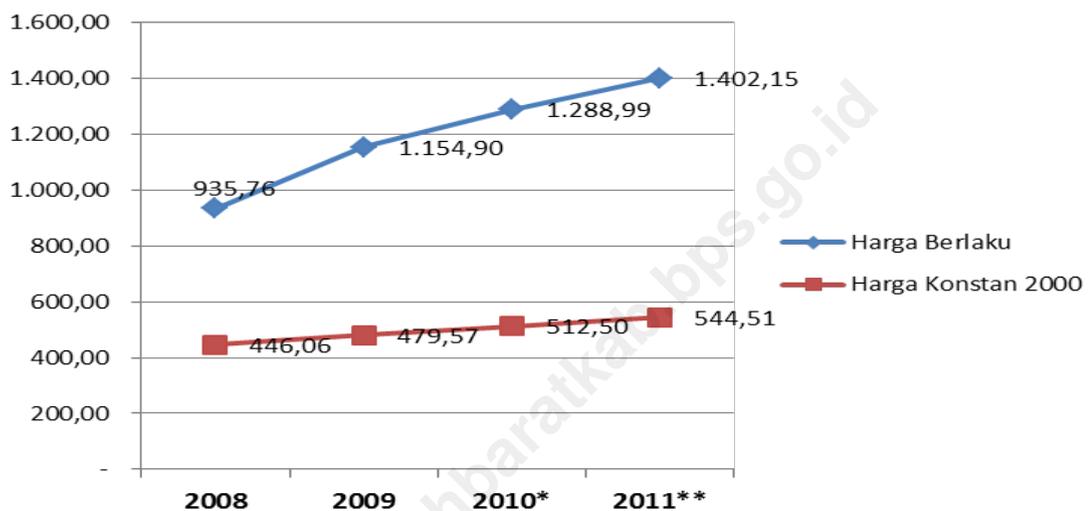
Peningkatan ini juga terus terjadi pada tahun-tahun selanjutnya. Konsumsi rumah tangga di Aceh Barat selama tahun 2010 dan 2011 masing-masing bernilai 1,29 dan 1,40 milyar rupiah. Dengan jumlah penduduk di tahun-tahun tersebut masing-masing senilai 173.558 dan 177.532 jiwa, maka rata-rata konsumsi per kapita per tahun yang terbentuk adalah 7,43 dan 7,90 juta rupiah atau 619 dan 658 ribu rupiah per bulannya. Dengan asumsi tiap rumah tangga dihuni oleh empat orang maka tiap rumah tangga mengkonsumsi rata-rata 2,48 juta rupiah per bulan di tahun 2010 dan 2,63 juta rupiah per rumah tangga per bulan sepanjang tahun 2011. PDRB komponen konsumsi rumah tangga selengkapnya dapat dilihat pada gambar 4.1.

Tingginya peningkatan konsumsi rumah tangga selama empat tahun terakhir tersebut selain disebabkan oleh naiknya pola konsumsi masyarakat dan laju pertumbuhan penduduk yang terus bertambah, melainkan juga disebabkan oleh kenaikan harga barang. Tanpa dipengaruhi oleh kenaikan harga barang, nilai konsumsi rumah tangga tetap bertambah setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari nilai konsumsi rumah tangga atas dasar

harga kontan tahun 2000 yang terus meningkat. Pada tahun 2008, total konsumsi rumah tangga di Aceh Barat mencapai 446,06 milyar rupiah. Angka ini naik lagi di tahun 2009 menjadi 479,57 milyar rupiah. Kemudian di tahun-tahun selanjutnya nilai komponen ini menjadi 512,50 dan 544,51 milyar rupiah. Perbedaan nilai PDRB antara kedua harga tersebut mengindikasikan terjadi kenaikan harga barang/jasa yang beredar di masyarakat.

Gambar 4.1

PDRB Komponen Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2008-2011 (Milyar Rupiah)



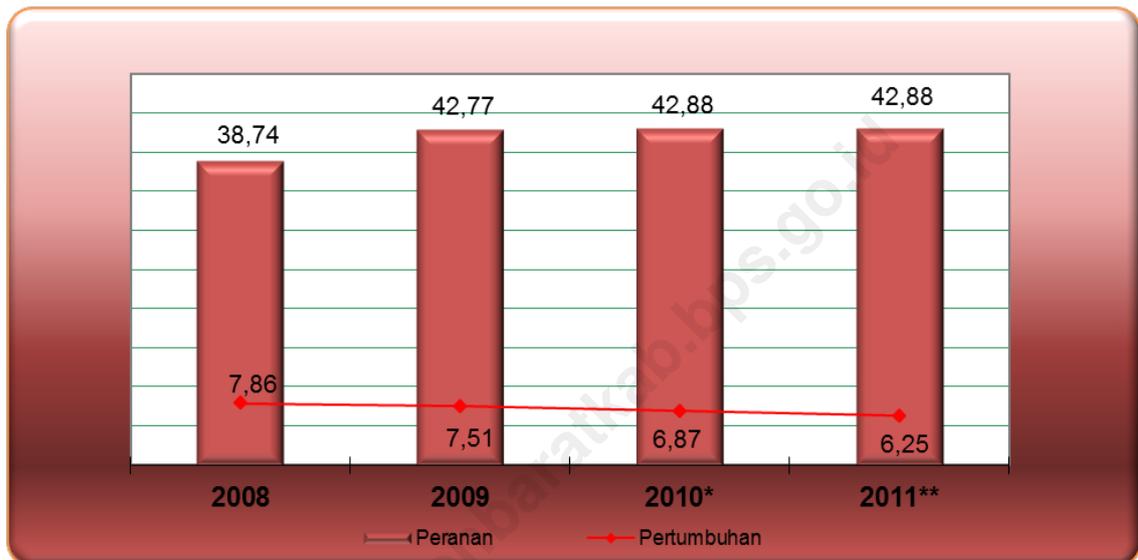
Peranan komponen konsumsi rumah tangga ini adalah yang terbesar dalam pembentukan PDRB menurut pengeluaran. Artinya PDRB Aceh Barat paling banyak dibelanjakan untuk konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2008, peranan konsumsi rumah tangga ini mencapai 38,74 persen. Artinya dari keseluruhan PDRB Aceh Barat, sebesar 38,74 persen diantaranya diperuntukkan bagi konsumsi rumah tangga. Sedangkan 61,26 persen sisanya dibelanjakan untuk lima komponen lainnya. Rendahnya peranan konsumsi rumah tangga di tahun tersebut dikarenakan masih tingginya peranan komponen Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB). Hal ini dapat dimaklumi mengingat tahun-tahun tersebut proses pembangunan masih gencar dilakukan.

Di tahun 2009, peranan komponen ini meningkat drastis menjadi 42,77 persen. Hal ini dikarenakan menurunnya peranan komponen PMTB dengan berkurangnya proses pembangunan seiring berakhirnya masa rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh Barat.

Sepanjang tahun 2010 hingga 2011, komponen ini berperan sebesar 42,88 persen terhadap pembentukan PDRB Aceh Barat menurut penggunaan. Kecilnya peningkatan peranan komponen ini terbilang baik akan tetapi diharapkan di tahun-tahun mendatang peranan konsumsi rumah tangga ini dapat terus ditekan. Salah satunya dengan membatasi laju pertumbuhan penduduk dan mengurangi pola konsumsi

masyarakat Aceh Barat yang cenderung amat konsumtif. Dengan semakin mengecilnya peranan konsumsi rumah tangga, diharapkan peranan komponen PMTB dan perubahan inventori dapat lebih dominan. Kedua komponen terakhir merupakan investasi bagi percepatan proses pembangunan. Peranan selengkapnya dapat dilihat pada gambar 4.2.

Gambar 4.2
Peranan dan Pertumbuhan Komponen Konsumsi Rumah Tangga
Tahun 2008-2011 (Persen)



Pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga sepanjang tahun 2008-2011 ini terbilang tinggi. Pada tahun 2008 komponen ini mampu tumbuh 7,86 persen dibanding tahun sebelumnya. Di tahun 2009, konsumsi rumah tangga ini kembali berkembang sebesar 7,51 persen. Demikian juga pada tahun-tahun berikutnya, rumah tangga di Aceh Barat semakin bertambah konsumsinya masing-masing sebesar 6,87 dan 6,25 persen. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada gambar 4.2.

Walaupun pertumbuhan komponen ini cenderung melambat tiap tahunnya, akan tetapi angka pertumbuhan yang sebesar 6-7 persen per tahun amatlah tinggi. Merunut dari pertumbuhan penduduk Aceh Barat yang sekitar 2-3 persen per tahun, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan konsumsi ini lebih besar disebabkan oleh konsumtifnya pola konsumsi masyarakat. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang, pertumbuhan komponen ini menjadi lebih rendah.

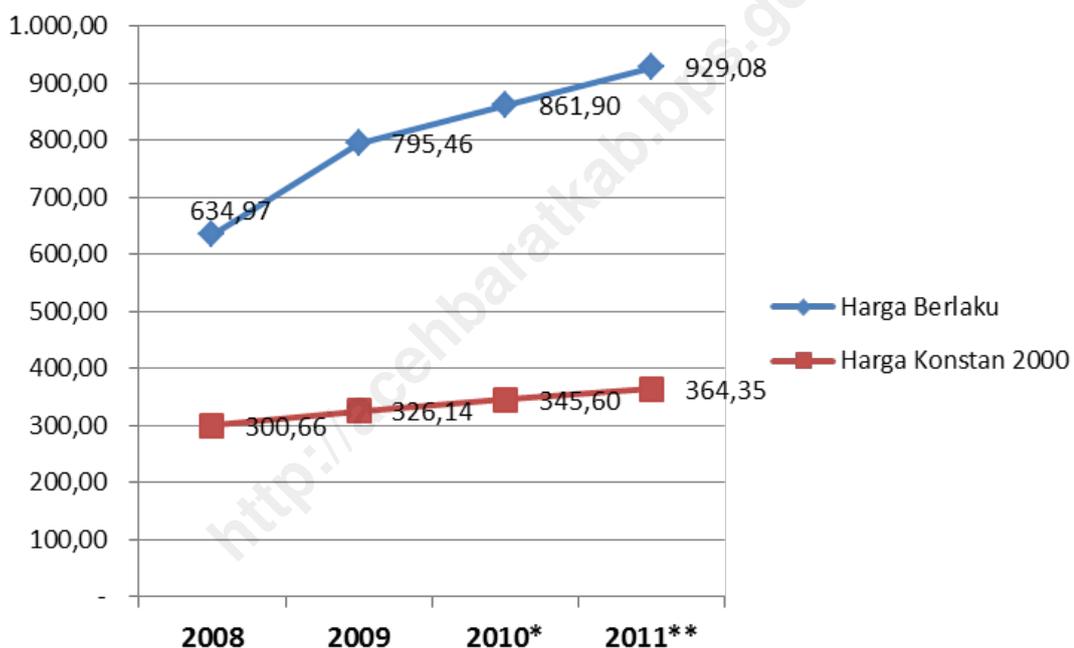
Untuk menekan laju pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga, kita harus memperhatikan dua sub komponen didalamnya, yaitu sub komponen makanan dan sub komponen non makanan. Sub komponen dengan kontribusi terbesar lah yang harus terlebih dahulu di kontrol.

4.1.1 Konsumsi Makanan

PDRB Komponen konsumsi rumah tangga sebagian besar (enam puluhan persen) berasal dari sub komponen konsumsi makanan, sisanya diperoleh dari sub komponen konsumsi rumah tangga non makanan. Artinya, rata-rata sekitar 60 persen konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga diperuntukkan untuk membeli kebutuhan makanan. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata masyarakat di Aceh Barat masih tergolong menengah ke bawah. Apabila masyarakat di suatu daerah telah digolongkan berpendapatan tinggi, maka konsumsi non makananlah yang akan lebih mendominasi.

Gambar 4.3

PDRB Sub Komponen Konsumsi Makanan Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2008-2011 (Milyar Rupiah)



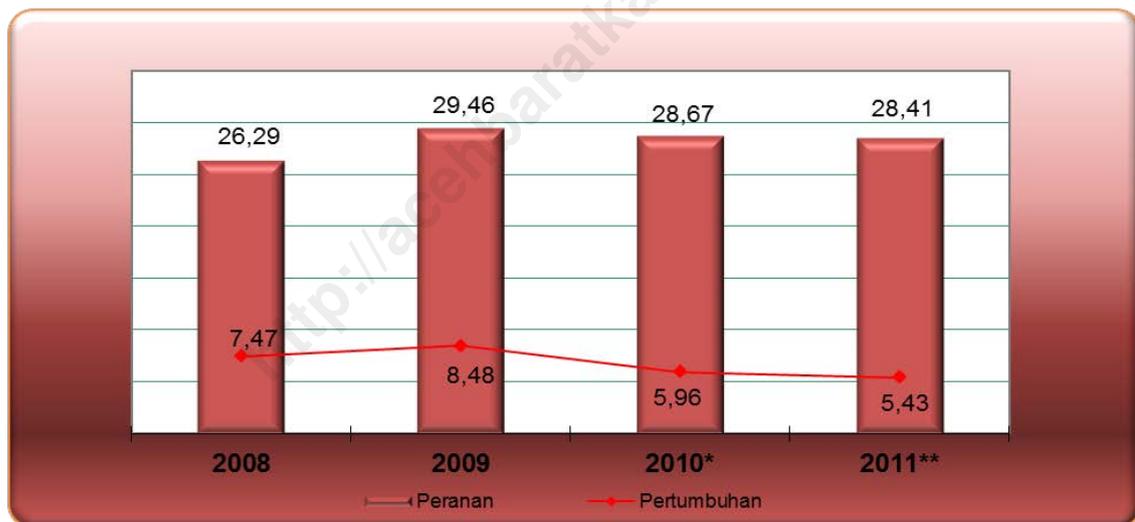
Nilai PDRB sub komponen konsumsi makanan selama tahun 2008-2011 menunjukkan kenaikan yang signifikan dari nilai 634,97 milyar di tahun 2008 menjadi 929,08 milyar pada tahun 2011. Angka ini masih memperhitungkan kenaikan harga barang. Oleh karena itu, untuk melihat kenaikan nilai konsumsi makanan masyarakat Aceh Barat yang murni dipakailah harga konstan tahun 2000.

Pada gambar 4.3 terlihat bahwa PDRB sub komponen ini atas dasar harga konstan juga terus bertambah dari 300,66 milyar di tahun 2008 menjadi 364,35 milyar rupiah di tahun 2011. Perbedaan antara nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan harga konstan 2000 menunjukkan bahwa selama empat tahun terakhir ini telah terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi.

Besarnya nilai PDRB sub komponen konsumsi makanan membuat peranan sub komponen ini terhadap PDRB juga tinggi. Masih tingginya peranan PMTB di tahun 2008 menjadikan peranan sub komponen makanan ini hanya sebesar 26,29 persen di tahun tersebut. Selama tahun 2009, peranan sub komponen ini meningkat drastis menjadi 29,46 persen. Penurunan peranan komponen PMTB dengan berakhirnya masa rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh Barat menjadi faktor penyebabnya.

Pada tahun-tahun selanjutnya peranan sub komponen ini cenderung menurun dengan semakin besarnya kontribusi yang diberikan oleh sub komponen non makanan. Hal ini cukup menggembirakan karena merupakan pertanda bahwa kehidupan masyarakat Aceh Barat semakin sejahtera. Diharapkan pada masa-masa mendatang kontribusi sub komponen makanan akan terus menurun sehingga peranan sub komponen non makananlah yang lebih mendominasi. Dengan demikian kehidupan masyarakat Aceh Barat yang sejahtera dapat terwujud.

Gambar 4.4
Peranan dan Pertumbuhan Sub Komponen Konsumsi Makanan
Tahun 2008-2011 (Persen)



Pertumbuhan sub komponen ini selama empat tahun terakhir termasuk tinggi, sekitar 5-7 persen. Di tahun 2008 konsumsi makanan oleh rumah tangga di Kabupaten Aceh Barat naik 7,47 persen dibanding tahun 2007. Kemudian konsumsi makanan rumah tangga ini naik lagi 8,48 persen di tahun 2009. Selanjutnya di tahun 2010 dan 2011 konsumsi makanan masyarakat Aceh Barat kembali bertambah masing-masing sebesar 5,96 dan 5,43 persen. Walaupun melambat sejak tahun 2010, akan tetapi pertumbuhan sub komponen ini masih terlalu tinggi. Bandingkan saja dengan pertumbuhan penduduk Aceh Barat yang selalu di bawah 3 persen.

Terkontrolnya pertumbuhan sub komponen makanan sebagai penyumbang terbesar terhadap komponen konsumsi rumah tangga akan berdampak besar terhadap

penurunan kontribusi komponen ini. Sehingga PDRB Aceh Barat dapat lebih dialokasikan kepada komponen investasi yaitu PMTB dan perubahan inventori.

4.1.2 Konsumsi Non Makanan

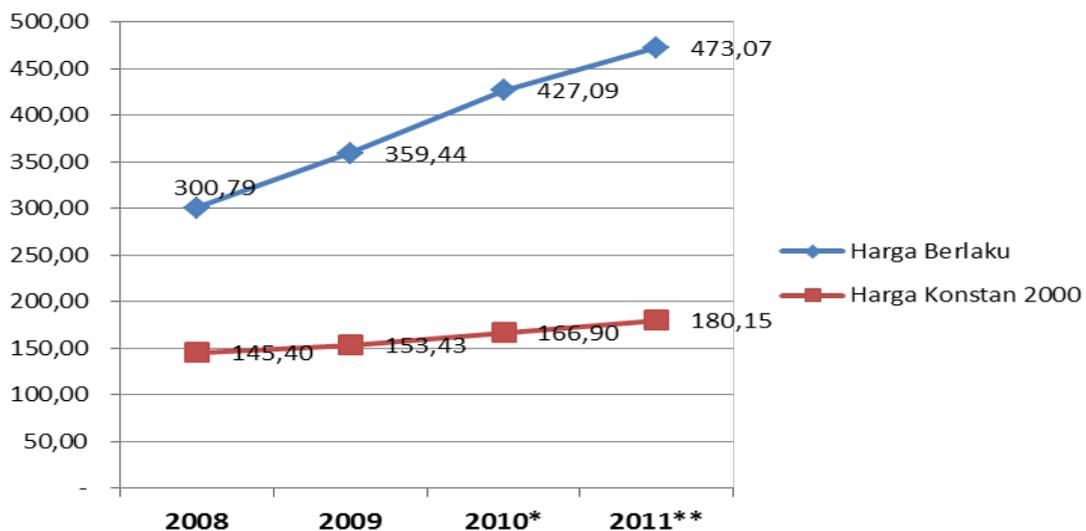
Dana yang dialokasikan masyarakat Aceh Barat untuk konsumsi non makanan ini lebih kecil daripada konsumsi makanan. Hal ini dapat dimaklumi bahwa pada masyarakat di daerah yang masih berkembang seperti Kabupaten Aceh Barat pendapatan masyarakatnya juga belum terlalu tinggi. Oleh karena itu kebutuhan makanan sebagai kebutuhan dasar akan lebih didahulukan untuk dipenuhi.

Adalah hal yang menggembirakan melihat komponen konsumsi rumah tangga di Aceh Barat yang dialokasikan untuk konsumsi non makanan semakin membesar setiap tahunnya. Di tahun 2008, dari 100 persen konsumsi rumah tangga di daerah ini, hanya 32 persen saja yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan non makanan. Kondisi ini terus membaik hingga pada tahun 2011 alokasi kebutuhan non makanan dapat mencapai 34 persen.

Pada gambar 4.5 juga terlihat bahwa pola konsumsi non makanan masyarakat Aceh Barat terus meningkat tajam setiap tahunnya. Di tahun 2008, pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan non makanan mencapai 300,79 milyar rupiah. Angka ini kembali bertambah pada tahun 2009 dan 2010 menjadi masing-masing sebesar 359,44 dan 427,09 milyar rupiah. Selanjutnya dana yang dialokasikan penduduk Aceh Barat untuk memenuhi kebutuhan non pangannya di tahun 2011 mencapai 473,07 milyar rupiah.

Gambar 4.5
PDRB Sub Komponen Konsumsi Non Makanan

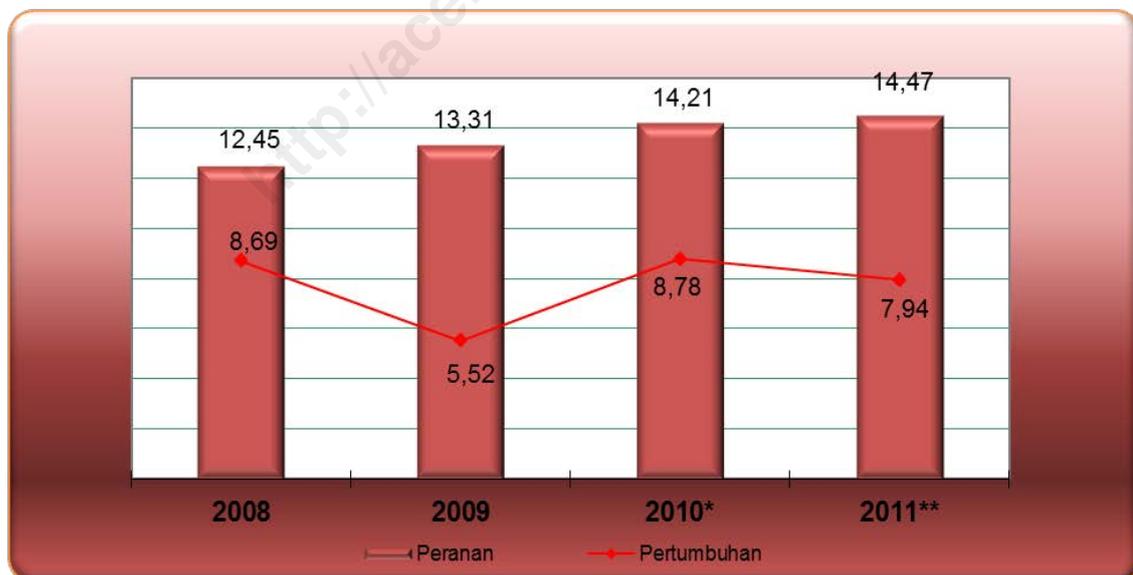
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2008-2011 (Milyar Rupiah)



Angka PDRB atas dasar harga berlaku diatas masih memperhitungkan kenaikan harga barang. Oleh karena itu, untuk melihat kenaikan nilai konsumsi non makanan masyarakat Aceh Barat yang murni dipakailah harga konstan tahun 2000. Pada gambar 4.5 terlihat bahwa PDRB sub komponen ini atas dasar harga konstan juga terus bertambah dari 145,40 milyar rupiah di tahun 2008 menjadi 180,15 milyar rupiah di tahun 2011. Perbedaan nilai atas dasar harga berlaku sub komponen ini dengan nilai atas dasar harga konstannya menunjukkan bahwa terjadi kenaikan harga barang non makanan setiap tahunnya.

Berbeda halnya dengan peranan konsumsi makanan yang terus menurun, peranan konsumsi non makanan malah semakin besar setiap tahunnya. Pada tahun 2008, PDRB Aceh Barat hanya dibelanjakan sebesar 12,45 persen untuk keperluan konsumsi non makanan. Akan tetapi distribusi ini semakin membaik setiap tahunnya sehingga di tahun 2011, total PDRB Aceh Barat yang dibelanjakan untuk kebutuhan non makanan menjadi 14,47 persen. Peningkatan kontribusi ini mengindikasikan ada peningkatan kesejahteraan yang tergambar dengan semakin mampunya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan non makanannya.

Gambar 4.6
Peranan dan Pertumbuhan Sub Komponen Konsumsi Non Makanan
Tahun 2008-2011 (Persen)



Pertumbuhan sub komponen ini dalam empat tahun terakhir terbilang tinggi, mencapai 6-9 persen. Pertumbuhan ini menggambarkan tingkat pencapaian kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dibanding tahun 2007, sub komponen ini dapat tumbuh sebesar 8,69 persen di tahun 2008. Kemudian konsumsi non makanan ini meningkat lagi sebesar 5,52 dan 8,78 persen di tahun 2009 dan 2010. Pada tahun 2011,

kebutuhan non makanan masyarakat Aceh Barat bertambah sebesar 7,94 persen dari tahun sebelumnya. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar 4.6.

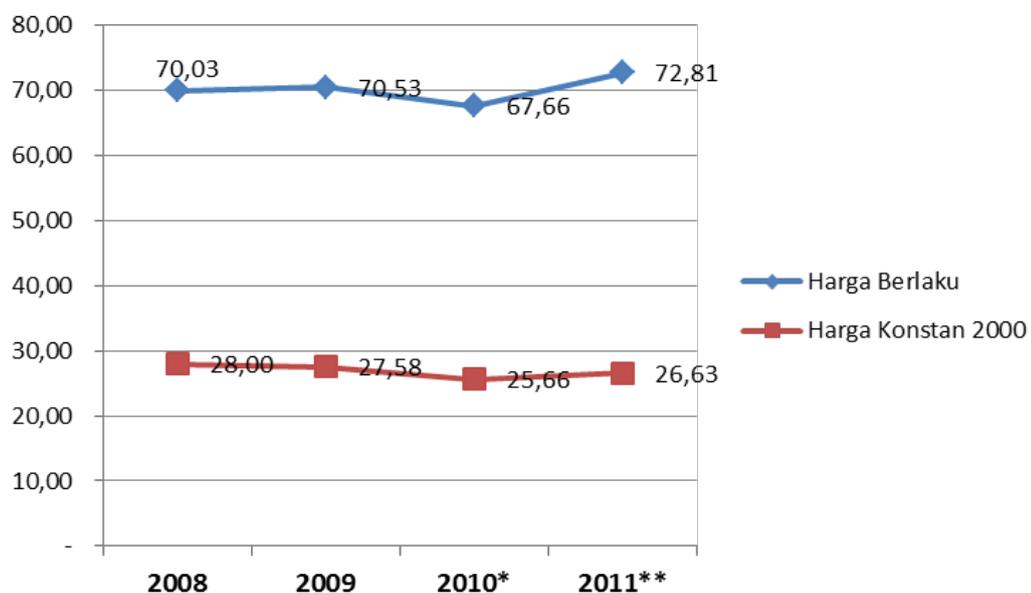
4.2 Komponen Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba

Lembaga swasta nirlaba dalam Kabupaten Aceh Barat berupa lembaga keagamaan (perkumpulan remaja masjid, wirid, tempat pengajian, dll), organisasi sosial (panti asuhan), organisasi profesi (IBI, IDI, Gapensi, dll), Perkumpulan kebudayaan/olah raga/hobi (sanggar tari, perkumpulan olah raga, arisan, dll), LSM asing maupun lokal, Partai Politik, serta Organisasi Kemasyarakatan (Muhammadiyah, NU, dll). Lembaga swasta tanpa tujuan menghasilkan laba yang dicakup disini adalah yang melayani rumah tangga.

Konsumsi lembaga swasta tanpa laba dalam Kabupaten Aceh Barat tergolong kecil. Masih banyaknya beroperasi LSM Asing maupun Lokal menjadikan total PDRB yang terbentuk untuk komponen ini sebesar 70 dan 71 milyar rupiah di tahun 2008 dan 2009. Berakhirnya masa rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh Barat pada tahun 2010 menyebabkan konsumsi LSM menurun drastis sehingga menyebabkan PDRB komponen ini menurun menjadi 68 milyar rupiah. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Aceh Barat pada tahun 2011 menjadikan membengkaknya konsumsi sebagian besar lembaga swasta nirlaba (terutama partai politik) sehingga PDRB komponen ini terbentuk sebesar 73 milyar rupiah.

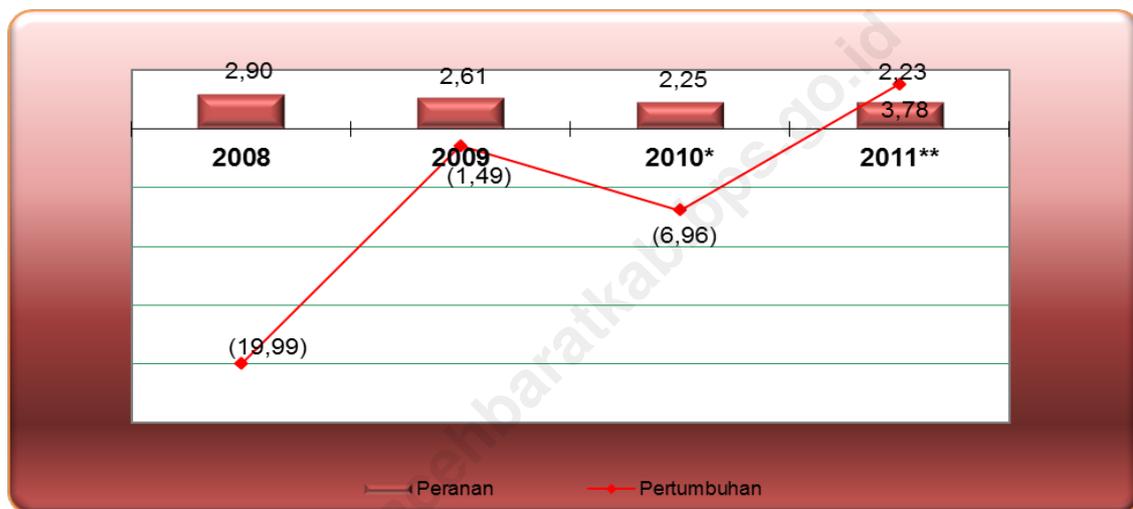
Gambar 4.7

PDRB Komponen Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2008-2011 (Milyar Rupiah)



PDRB komponen konsumsi lembaga swasta nirlaba diatas masih dipengaruhi oleh kenaikan harga barang, untuk melihat kenaikan murni konsumsi komponen ini dipakailah PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000. Sama halnya dengan PDRB komponen tersebut atas dasar harga berlaku, nilai konsumsi komponen ini atas dasar harga konstan tahun 2000 juga meningkat di tahun 2009, kemudian sempat menurun di tahun 2010 lalu bertambah lagi di tahun 2011. Adanya jarak antara PDRB atas kedua harga tersebut menandakan bahwa kenaikan barang dan jasa di Kabupaten Aceh Barat terus terjadi.

Gambar 4.8
Peranan dan Pertumbuhan Komponen Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba
Tahun 2008-2011 (Persen)



Peranan komponen lembaga swasta nirlaba ini terus mengalami penurunan dari 2,90 persen di tahun 2008 menjadi 2,23 persen di tahun 2011. Penurunan ini mengindikasikan bahwa setelah berakhirnya masa rehabilitasi dan rekontruksi di tahun 2009, peranan lembaga non profit ini terhadap PDRB Aceh Barat menurut penggunaan semakin berkurang. Peranan komponen ini selengkapny dapat dilihat pada tabel 4.8.

Pertumbuhan komponen ini erat kaitannya dengan nilai PDRB komponen lembaga swasta nirlaba atas dasar harga konstan. Semakin berkurangnya proses rehabilitasi dan rekontruksi di tahun 2008 dibanding tahun sebelumnya, menjadikan pengeluaran komponen ini menurun sebesar 19,99 persen. Berakhirnya masa rehabilitasi dan rekontruksi di Aceh Barat pada pertengahan tahun 2009 menjadikan pertumbuhan komponen ini menurun lagi sebesar 1,49 persen dibanding tahun 2008. Selanjutnya, berakhirnya masa operasi sebagian besar LSM asing di Kabupaten ini menyebabkan pada tahun 2010 konsumsi komponen ini kembali berkurang sebesar 6,96 persen dibanding tahun sebelumnya. Baru pada tahun 2011 dengan pelaksanaan Pilkada Aceh Barat di pertengahan tahun menjadikan komponen ini dapat tumbuh sebesar 3,78 persen.

4.3 Komponen Konsumsi Pemerintah

Komponen konsumsi pemerintah (mencakup belanja pegawai dan belanja barang) yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (sampai dengan level desa) ini terus bertambah nilainya seiring dengan penambahan PNS vertikal/daerah, TNI/Polri dan juga aparatur desa. Selain itu, peningkatan tunjangan kerja dan renumerasi di beberapa instansi vertikal dan tubuh TNI/Polri juga ikut andil dalam mendongkrak nilai komponen tersebut.

Pada tahun 2008, nilai pengeluaran komponen konsumsi pemerintah ini sebesar 520,92 milyar rupiah. Angka ini terus bertambah hingga mencapai 725,65 milyar rupiah di tahun 2011. Bila dilihat atas dasar harga konstan tahun 2000 pun tetap terjadi peningkatan yang signifikan pada komponen tersebut, dari 271 milyar rupiah di tahun 2008 menjadi 308 milyar rupiah di tahun 2011. Perbedaan kedua angka PDRB ini mengindikasikan adanya kenaikan harga yang terjadi pada komponen tersebut.

Gambar 4.9

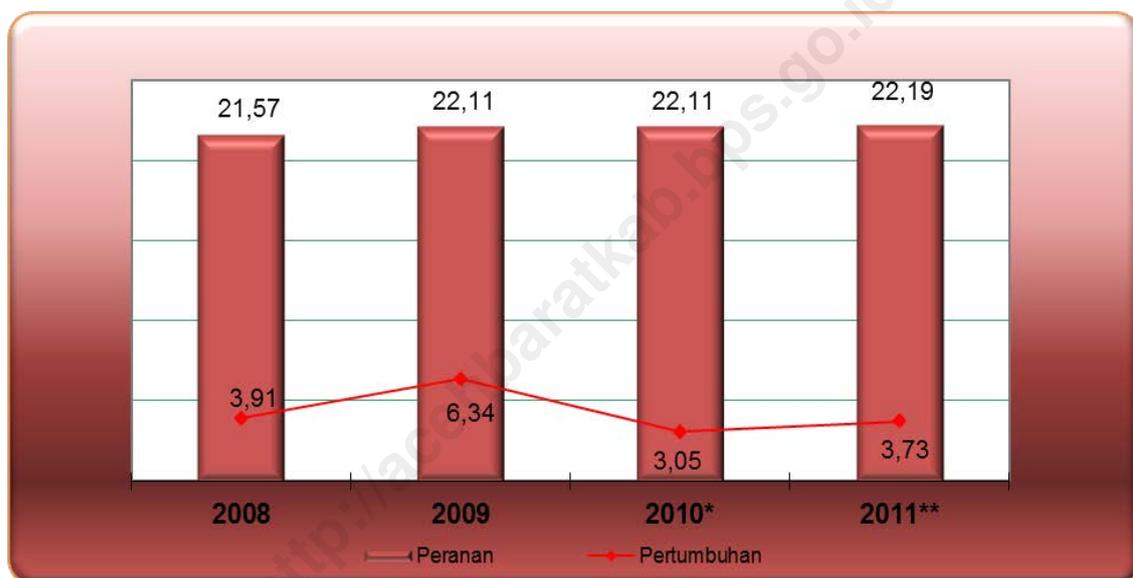
PDRB Komponen Konsumsi Pemerintah Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2008-2011 (Milyar Rupiah)



Peranan komponen konsumsi pemerintah merupakan penyedot PDRB terbesar ketiga setelah komponen konsumsi rumah tangga dan komponen PMTB. Peranan komponen ini terus bertambah dari 21,57 persen di tahun 2008 menjadi 22,19 persen di tahun 2011. Artinya selama kurun waktu empat tahun terakhir ini, sebesar sekitar 22 persen dari total PDRB Aceh Barat digunakan untuk membiayai kinerja aparatur daerah. Aparatur daerah Aceh Barat ini sebagian besar diisi oleh PNS daerah dan aparatur desa, kemudian diikuti oleh petugas TNI/Polri dan sisanya diisi oleh PNS instansi vertikal. Makin membesarnya peranan komponen ini akan terus membebani PDRB Aceh Barat.

Penambahan pegawai setiap tahunnya, terutama PNS daerah, sebaiknya dievaluasi harus benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah. Amat disayangkan apabila penambahan pegawai yang dilakukan hanya akan membebani PDRB daerah, akan tetapi tidak memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat maupun kinerja pemerintahan umumnya. Untuk itu, optimalisasi kinerja aparatur daerah yang telah ada akan lebih baik dilakukan daripada menambah jumlah aparatur daerah yang baru.

Gambar 4.10
Peranan dan Pertumbuhan Komponen Konsumsi Pemerintah
Tahun 2008-2011 (Persen)



Pertumbuhan komponen konsumsi pemerintah ini selalu bernilai positif (meningkat) setiap tahunnya. Pada gambar diatas terlihat bahwa selama tahun 2008 komponen ini mampu tumbuh sebesar 3,91 persen. Di tahun berikutnya komponen ini meningkat kembali bahkan lebih cepat sebesar 6,34 persen. Walaupun lebih lambat dibanding tahun sebelumnya, di tahun 2010 komponen ini tetap dapat tumbuh senilai 3,05 persen. Bahkan selama tahun 2011 komponen ini kembali bertambah sebesar 3,73 persen.

Pertumbuhan positif ini lebih disebabkan oleh penerimaan CPNS tiap tahunnya (terutama oleh Pemerintah Daerah) dan juga pemberian renumerasi di beberapa instansi vertikal. Peraturan pemerintah tentang penghentian penerimaan CPNS formasi teknis dan administrasi dengan hanya menerima CPNS formasi kesehatan dan pendidikan hingga tahun 2014 diharapkan mampu menekan angka pertumbuhan ini.

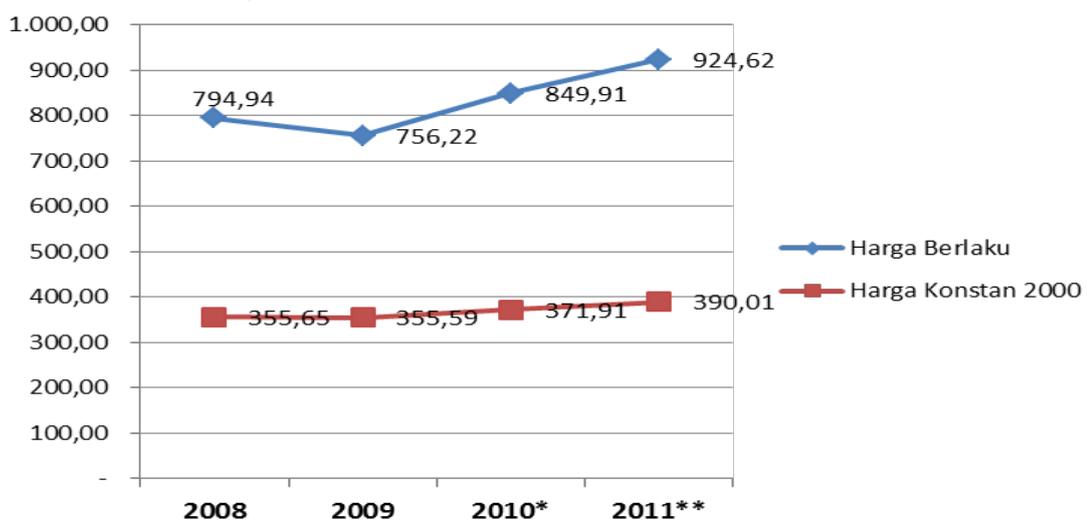
4.4 Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ini penting untuk diperhatikan karena merupakan aset investasi daerah. Berbeda dengan konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta nirlaba dan konsumsi pemerintah yang bersifat pengeluaran/belanja, sebaliknya komponen ini malah akan menghasilkan output ekonomi terhadap daerah. Betapa tidak, yang termasuk dalam komponen ini adalah pengerjaan konstruksi (baik bangun baru maupun perbaikannya); pembelian mesin, perlengkapan dan alat transportasi; serta perluasan perkebunan dan penanaman baru, yang notabene merupakan sarana untuk menghasilkan produksi penunjang bertambahnya nilai PDRB Aceh Barat selanjutnya. Oleh karena itu, pengeluaran PDRB untuk komponen ini diharapkan semakin besar setiap tahunnya.

Nilai PMTB Kabupaten Aceh Barat yang terbentuk selama tahun 2008 adalah sebesar 794,94 milyar rupiah. Nilai yang cukup tinggi seiring dengan gencarnya pembangunan saat itu. Berakhirnya program rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh Barat pada April 2009 membuat nilai PMTB di tahun 2009 menjadi sedikit berkurang menjadi 756,22 milyar rupiah. Mulai dilakukannya perbaikan jalan dan jembatan di tahun 2010 menjadikan nilai PMTB daerah ini kembali membaik mencapai 850 milyar rupiah. Semakin gencarnya proses pembangunan jalan dan jembatan di tahun 2011 membuat PMTB di tahun tersebut menjadi 925 milyar rupiah. Seperti terlihat pada gambar 4.11 di bawah ini.

Gambar 4.11

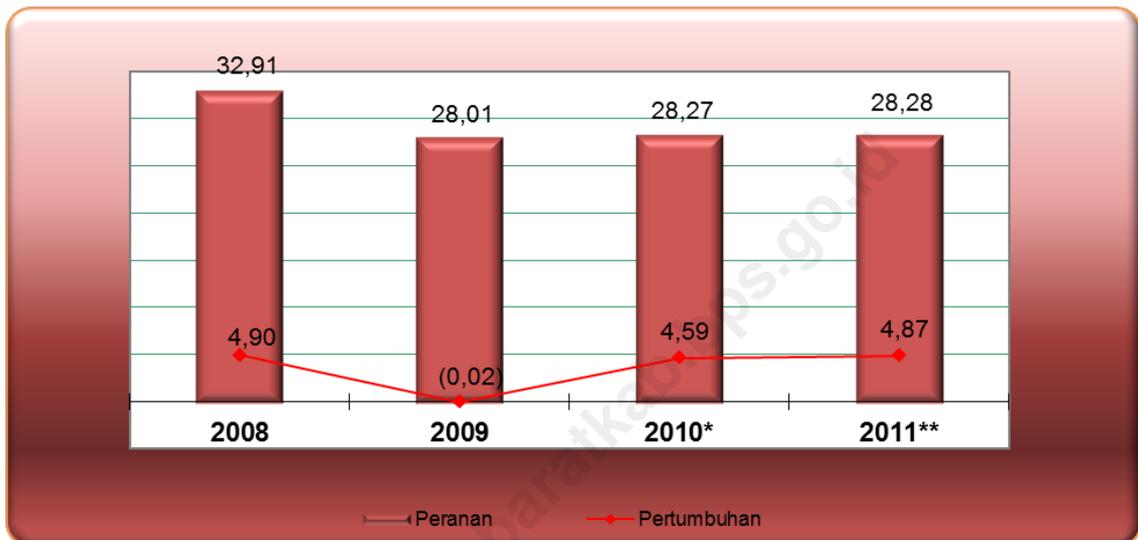
PDRB Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2008-2011 (Milyar Rupiah)



Tanpa dipengaruhi oleh kenaikan harga barang, pola PMTB Aceh Barat atas dasar harga konstan tahun 2000 tidak berbeda dengan pola PMTB Aceh Barat atas dasar harga

berlaku. Nilai PMTB Aceh Barat sempat menurun sedikit di tahun 2009 menjadi 355,59 milyar rupiah dengan berkurangnya proses pembangunan yang dilakukan. Kemudian bangkit lagi di tahun 2010 dan 2011 menjadi 371,91 dan 390,01 milyar rupiah dengan pembangunan jalan dan jembatan yang dilakukan pemerintah daerah

Gambar 4.12
Peranan dan Pertumbuhan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto
Tahun 2008-2011 (Persen)



Peranan komponen PMTB ini merupakan yang terbesar kedua setelah komponen konsumsi rumah tangga. Peranan dan pertumbuhan komponen ini di tahun 2008 cukup tinggi, masing-masing mencapai mencapai 32,91 persen dan 4,90 persen. Angka yang cukup besar mengingat pada masa tersebut proses pembangunan masih gencar dilakukan. Berakhirnya masa rehabilitasi dan rekontruksi membuat peranan komponen ini sempat anjlok di tahun 2010 menjadi hanya 28,01 persen dan pertumbuhannya pun menurun sebesar 0,02 persen. Proses pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah di tahun 2010 membuat peranan dan pertumbuhan komponen ini kembali bangkit mencapai angka 28,27 persen dan 4,59 persen. Demikian juga dengan tahun 2011 dimana peranan komponen ini bertambah menjadi 28,28 persen dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,87 persen. Peranan dan pertumbuhan komponen PMTB ini selengkapnya dapat dilihat pada gambar 4.12.

Diharapkan setelah PLTD Nagan Raya beroperasi, maka pertambangan batubara akan segera berproduksi dan pelabuhan ekspor batubara di Aceh Barat mulai dibangun. Aset pertambangan batu bara ini dan proses pembangunan pelabuhan tersebut sudah pasti akan melejitkan nilai PMTB daerah ini.

4.5 Komponen Perubahan Inventori

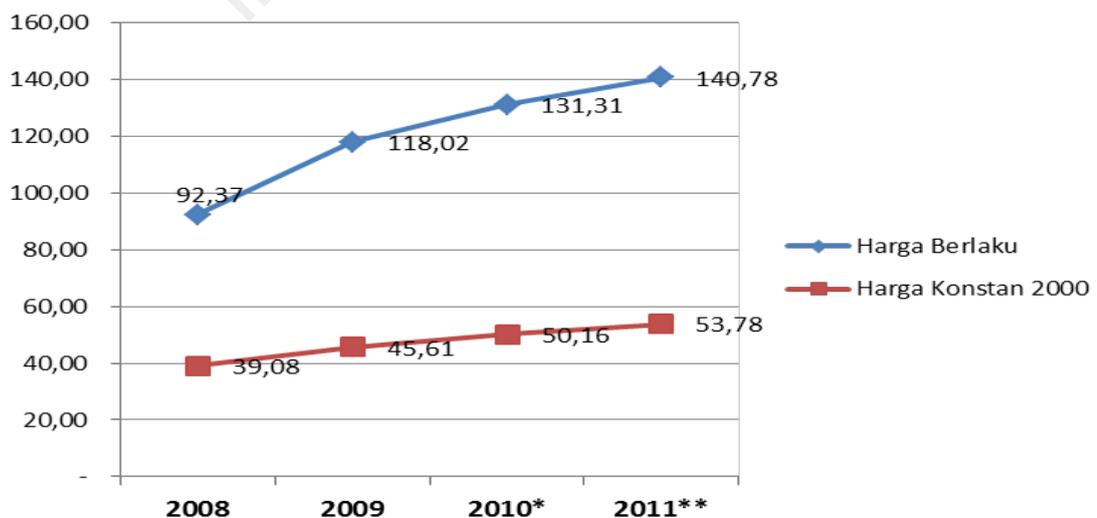
Seperti juga halnya komponen PMTB sebelumnya, komponen perubahan inventori ini juga merupakan aset untuk pemerintah daerah. Perubahan inventori ini berupa hasil produksi/barang dagangan yang belum terjual, bahan baku/bahan penolong/bahan setengah jadi yang belum diolah, populasi ternak yang belum dipotong, serta stok beras dan gula oleh pemerintah. Barang-barang tersebut akan mendatangkan pemasukan ke daerah apabila telah terjual nantinya.

Nilai perubahan inventori ini cukup kecil, pada tahun 2008 perubahan inventori dalam Kabupaten Aceh Barat sebesar 92,37 milyar rupiah. Artinya, inventori (barang dagangan yang belum terjual, barang setengah jadi yang belum selesai diproduksi, barang persediaan yang belum habis dipakai serta ternak yang belum dipotong) dalam Kabupaten Aceh Barat keadaan 31 Desember 2011 dikurangi keadaan 1 Januari 2011 tersisa sebesar 92,32 milyar rupiah lagi.

Selama kurun waktu 2009 hingga 2011, perubahan inventori dalam kabupaten Aceh Barat selalu bernilai positif. Hal ini mengindikasikan bahwa selalu terjadi penambahan inventori di akhir tahun. Sebaliknya apabila perubahan inventori ini bernilai negatif maka dapat diartikan bahwa hasil produksi/barang dagangan, bahan baku/bahan setengah jadi, populasi ternak dan stok dalam Kabupaten Aceh Barat keadaan 1 Januari 2011 lebih besar dibanding keadaan 31 Desember 2011.

Gambar 4.13

PDRB Komponen Perubahan Inventori Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2008-2011 (Milyar Rupiah)

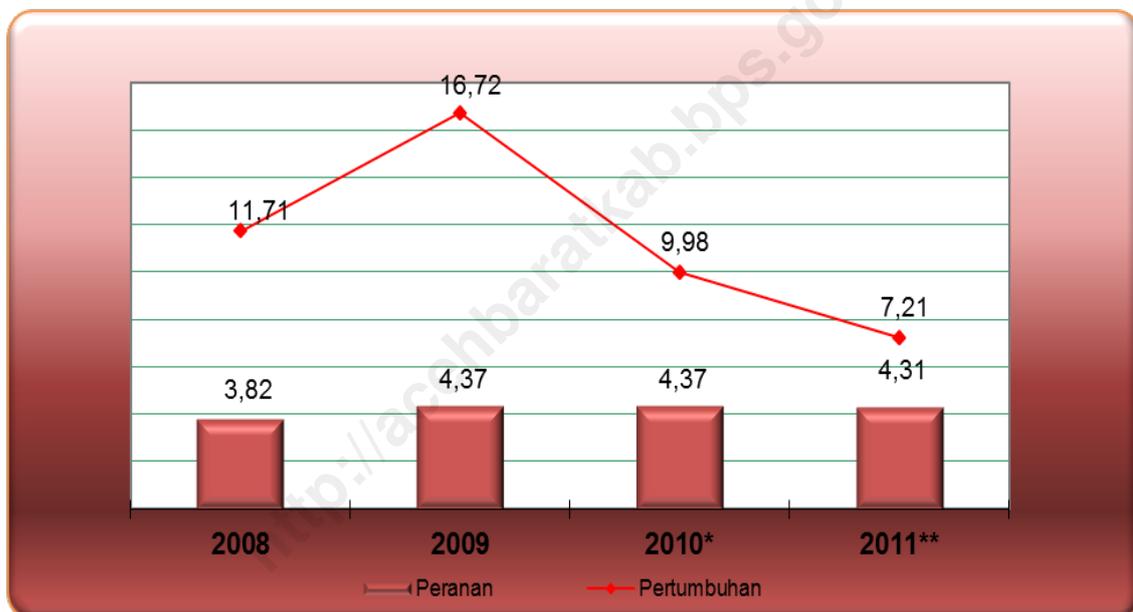


Pada tahun 2009, perubahan inventori yang terbentuk sebesar 118 milyar rupiah. Demikian juga dengan tahun-tahun selanjutnya. Penambahan jumlah swalayan

yang beroperasi dan dimulainya pengerjaan pembangunan jalan dan jembatan dengan bahan baku tanah/pasir/kerikil selama tahun 2010 dan 2011 menjadikan perubahan inventori pada tahun tersebut mencapai masing-masing sebesar 131 dan 141 milyar rupiah.

Pola yang sama juga terjadi pada pembentukan PDRB komponen perubahan inventori atas dasar harga konstan tahun 2000. Setiap tahunnya PDRB komponen tersebut bertambah dari 39 milyar rupiah di tahun 2008 menjadi 54 milyar rupiah selama tahun 2011. Perbedaan angka komponen ini antara harga berlaku dan harga konstan wajar terjadi mengingat tingginya kenaikan harga barang dan jasa di Aceh Barat.

Gambar 4.14
Peranan dan Pertumbuhan Komponen Perubahan Inventori
Tahun 2008-2011 (Persen)



Peranan komponen ini selama empat tahun terakhir terbilang kecil, yaitu hanya sekitar empat persen. Pada tahun 2008, peranan perubahan inventori terhadap pembentukan PDRB Aceh Barat adalah sebesar 3,82 persen. Di tahun-tahun selanjutnya, komponen ini menyumbang 4,37 persen terhadap PDRB Aceh Barat. Sedangkan peranan komponen tersebut di tahun 2011 sedikit menurun menjadi 4,31 persen.

Disisi lain pertumbuhan komponen ini selalu bernilai positif bahkan terbilang tinggi. Di tahun 2008, komponen ini mampu tumbuh sebesar 11,71 persen, kemudian tetap tumbuh semakin cepat di tahun 2009 sebesar 16,72 persen. Di tahun-tahun selanjutnya komponen ini tetap tumbuh sebesar 9,98 dan 7,21 persen walaupun lebih lambat.

4.6 Komponen Ekspor Netto

Arus perdagangan suatu daerah tidak akan terlepas dari pengaruh daerah luar. Dalam kehidupan ekonomi suatu daerah, arus barang keluar masuk daerah pasti akan terjadi. Hasil produksi suatu daerah selain dikonsumsi oleh masyarakat daerah tersebut juga akan diekspor keluar daerah, baik keluar kabupaten, keluar propinsi maupun ke luar negeri. Begitu juga sebaliknya, kebutuhan masyarakat suatu daerah apabila tidak diproduksi di daerah tersebut maka akan didatangkan dari luar daerah, baik dari luar kabupaten, luar propinsi maupun luar negeri. Barang/jasa hasil produksi dalam negeri yang dikirim keluar daerah dinamakan ekspor. Sedangkan barang/jasa hasil produksi luar daerah yang dimasukkan ke suatu daerah dinamakan impor. Selisih antara ekspor dan impor barang/jasa tersebut disebut ekspor netto.

Apabila ekspor netto ini bernilai positif berarti ekspor yang dilakukan daerah tersebut lebih besar nilainya dibanding impor yang terjadi. Hal ini tentu saja lebih menguntungkan daerah dimaksud. Sebaliknya apabila ekspor netto ini bernilai negatif, maka nilai impor yang dilakukan penghuni daerah tersebut lebih tinggi dibanding eksportnya.

Kabupaten Aceh Barat sebagai daerah induk dan lebih maju dibanding daerah sekitar tentu banyak dimanfaatkan oleh kabupaten-kabupaten tetangga tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalkan saja tempat penginapan, taman bermain, rumah makan/restoran, sarana pendidikan (khususnya perguruan tinggi), tempat olah raga, alat angkutan umum dan usaha perdagangan. Banyak penduduk Kabupaten sekitar, terutama Nagan Raya dan Aceh Jaya yang memanfaatkan fasilitas ini. Hal ini tentu saja menguntungkan Kabupaten Aceh Barat dan membuat komponen ekspor netto menjadi positif.

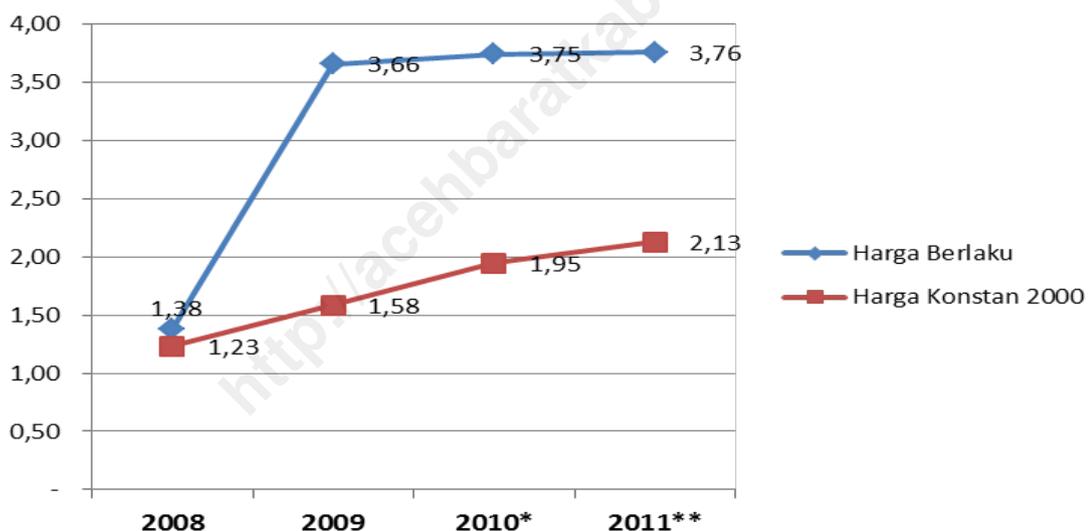
Selain melakukan ekspor keluar kabupaten, Aceh Barat juga melakukan ekspor keluar Propinsi, terutama ke Sumatera Utara. Komoditi perkebunan yang terutama diekspor adalah kelapa sawit, karet dan pinang. Sedangkan komoditi yang diekspor Aceh Barat keluar negeri adalah minyak kelapa sawit (CPO) dan hasil perikanan. Besarnya hasil produksi karet, kelapa sawit dan CPO beberapa tahun terakhir serta harganya yang cukup menjanjikan menjadikan ekspor komoditi hasil perkebunan ini mendatangkan kontribusi yang besar terhadap komponen ekspor netto di Aceh Barat.

Disisi lain, banyak kebutuhan masyarakat Aceh Barat yang tidak diproduksi di dalam daerah dan harus didatangkan dari luar. Seperti halnya sayuran (bawang, tomat), buah-buahan, pakaian jadi, makanan dan minuman jadi, bahan bangunan, barang elektronik, dan masih banyak lagi. Impor barang-barang ini tentu saja mengurangi nilai komponen ekspor netto Aceh Barat.

Secara total, jumlah ekspor yang dilakukan kabupaten Aceh Barat lebih besar dibanding impor yang terjadi. Sehingga sepanjang tahun 2008 hingga tahun 2011 komponen ekspor netto yang terbentuk bernilai positif. Akan tetapi nilainya masih sangat kecil, bahkan terkecil dibandingkan nilai kelima komponen lainnya.

Selama tahun 2008, PDRB komponen ekspor netto Aceh Barat hanya senilai 1,38 milyar rupiah. Lonjakan harga komoditi karet dan kelapa sawit menyebabkan PDRB yang terbentuk di tahun 2009 melejit mencapai 3,66 milyar rupiah. Kemudian semakin tingginya produksi karet dan kelapa sawit di tahun 2010 membuat PDRB komponen ini bertambah menjadi 3,75 milyar rupiah. Walaupun produksi kedua komoditi ini terus meningkat di tahun 2011, akan tetapi harga karet dan kelapa sawit yang mulai menurun di tahun tersebut membuat PDRB komponen ini hanya mencapai angka 3,76 milyar rupiah.

Gambar 4.15
PDRB Komponen Ekspor Netto Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan
Tahun 2008-2011 (Milyar Rupiah)



Lonjakan PDRB komponen ekspor netto ini di tahun 2009 akibat lonjakan harga tidak terlihat pada nilai komponen ini berdasarkan harga konstan tahun 2000. Hal ini dikarenakan PDRB tersebut murni melihat kenaikan volume ekspor/impor tanpa memperhitungkan kenaikan harga yang terjadi. Pada gambar 4.15 terlihat bahwa selama kurun waktu 2008-2011 komponen ekspor netto terus bertambah dari 1,23 milyar rupiah di tahun 2008 menjadi 2,13 milyar rupiah selama tahun 2011. Hal ini mengindikasikan setiap tahunnya terjadi pertumbuhan volume ekspor barang dalam Kabupaten Aceh Barat.

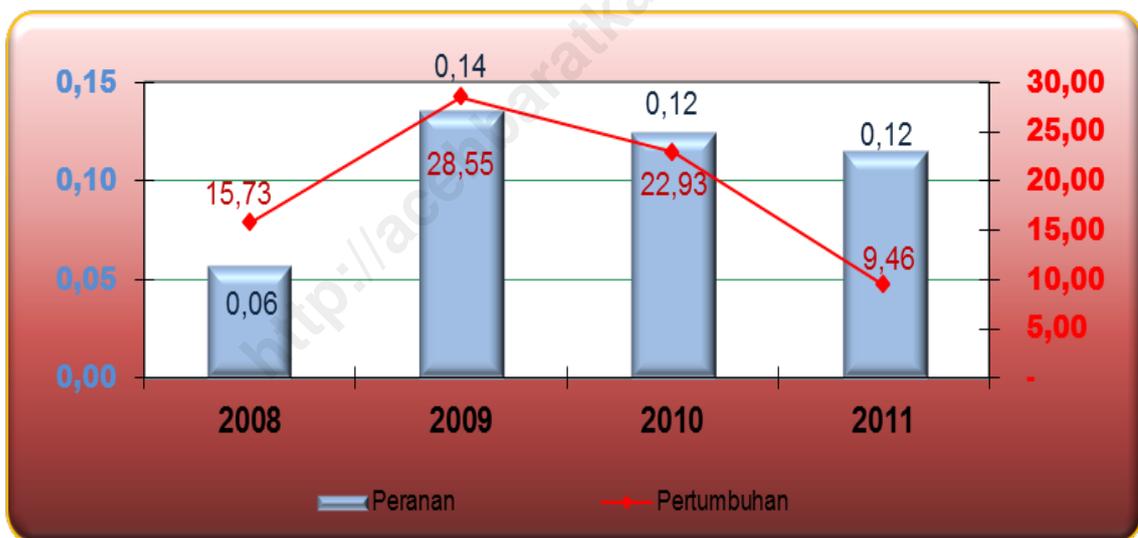
Pertumbuhan volume ekspor tersebut tercatat sebesar 15,73 persen di tahun 2008. Angka yang mencapai belasan persen ini terbilang sangat tinggi. Ini dikarenakan

pada tahun tersebut impor yang dilakukan daerah ini menurun drastis dibanding tahun 2007. Di lain pihak, harga komoditi perkebunan yang mulai menanjak, menggiurkan produsen karet dan kelapa sawit untuk meningkatkan produksinya.

Pada tahun 2009, angka pertumbuhan yang terbentuk malah lebih tinggi yaitu mencapai 28,55 persen. Angka fantastis ini disebabkan berakhirnya masa rehab dan rekon di Aceh Barat membuat impor bahan bangunan menurun. Sedangkan produksi karet dan kelapa sawit terus digenjot mengejar harga kedua komoditi tersebut yang masih tetap tinggi.

Selama tahun 2010 dan 2011, komponen ini tumbuh pesat kembali senilai 22,93 dan 9,46 persen. Penurunan impor bahan konstruksi dan bertambahnya komoditi ekspor hasil perkebunan membuat komponen ini terus tumbuh walaupun makin melambat.

Gambar 4.16
Peranan dan Pertumbuhan Komponen Ekspor Netto Tahun 2008-2011 (Persen)



Peranan komponen ini di tahun 2008 hanya 0,06 persen. Meningkatnya nilai ekspor bahan perkebunan dengan melonjaknya harga komoditi karet dan kelapa sawit membuat peranan komponen ini meningkat pesat di tahun 2009 menjadi 0,14 persen. Sayangnya harga kedua komoditi tersebut kembali menurun di tahun 2010 dan 2011 sehingga menjadikan peranan komponen ini berkurang menjadi 0,12 persen.

Paling kecilnya nilai PDRB komponen ini atas dasar harga berlaku, menjadikan komponen ini mempunyai kontribusi terkecil dalam pembentukan PDRB Aceh Barat menurut penggunaan. Peranan komponen ekspor netto ini hanya sekitar nol persen per tahun. Dapat dikatakan bahwa volume ekspor yang dilakukan penduduk Aceh Barat

hampir seimbang dengan volume impor yang dibutuhkan. Kedepannya diharapkan dengan beroperasinya PLTD Nagan Raya dan berproduksinya pertambangan batubara di Aceh Barat, kita dapat terus meningkatkan ekspor sehingga peranan komponen ini bisa bertambah secara kontinyu.

<http://acehbaratkab.bps.go.id>



TABEL LAMPIRAN

<http://acehbaratkaibps.go.id>



Tabel A
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Barat Menurut Penggunaan
Atas Dasar Harga Berlaku
(Juta Rupiah)

Komponen	2008	2009	2010*	2011**
1. Konsumsi Rumah Tangga	935 760,62	1 154 895,22	1 288 988,69	1 402 149,11
1.1 Makanan	634 970,54	795 457,09	861 902,75	929 079,08
1.2 Non Makanan	300 790,07	359 438,13	427 085,94	473 070,03
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	70 031,86	70 532,19	67 660,27	72 814,13
3. Konsumsi Pemerintah	520 919,85	596 903,38	664 591,84	725 649,88
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	794 937,02	756 218,12	849 913,73	924 624,97
5. Perubahan Inventori	92 374,09	118 023,96	131 308,80	140 784,48
6. Net Ekspor	1 381,07	3 661,81	3 747,08	3 762,09
PDRB	2 415 404,51	2 700 234,68	3 006 210,41	3 269 784,66

*) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Tabel B
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Barat Menurut Penggunaan
Atas Dasar Harga Konstan 2000
(Juta Rupiah)

Komponen	2008	2009	2010*	2011**
1. Konsumsi Rumah Tangga	446 058,17	479 570,54	512 495,87	544 518,22
1.1 Makanan	300 658,02	326 143,21	345 595,17	364 364,81
1.2 Non Makanan	145 400,16	153 427,32	166 900,71	180 153,41
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	27 997,07	27 580,21	25 661,33	26 630,44
3. Konsumsi Pemerintah	270 804,25	287 970,66	296 761,17	307 831,78
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	355 650,56	355 589,33	371 907,48	390 000,91
5. Perubahan Inventori	39 075,30	45 610,08	50 163,99	53 782,17
6. Net Ekspor	1 232,01	1 583,71	1 946,90	2 131,00
PDRB	1 140 817,35	1 197 904,53	1 258 936,75	1 324 894,54

*) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Tabel C
Peranan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Barat Menurut Penggunaan
atas Dasar Harga Berlaku
(Persen)

Komponen	2008	2009	2010*	2011**
1. Konsumsi Rumah Tangga	38,74	42,77	42,88	42,88
1.1 Makanan	26,29	29,46	28,67	28,41
1.2 Non Makanan	12,45	13,31	14,21	14,47
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	2,90	2,61	2,25	2,23
3. Konsumsi Pemerintah	21,57	22,11	22,11	22,19
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	32,91	28,01	28,27	28,28
5. Perubahan Inventori	3,82	4,37	4,37	4,31
6. Net Ekspor	0,06	0,14	0,12	0,12
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Tabel D
Peranan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Barat Menurut Penggunaan
atas Dasar Harga Konstan 2000
(Persen)

Komponen	2008	2009	2010*	2011**
1. Konsumsi Rumah Tangga	39,10	40,03	40,71	41,10
1.1 Makanan	26,35	27,23	27,45	27,50
1.2 Non Makanan	12,75	12,81	13,26	13,60
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	2,45	2,30	2,04	2,01
3. Konsumsi Pemerintah	23,74	24,04	23,57	23,23
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,18	29,68	29,54	29,44
5. Perubahan Inventori	3,43	3,81	3,98	4,06
6. Net Ekspor	0,11	0,13	0,15	0,16
PDRB				

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Tabel E
Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Barat Menurut Penggunaan
Atas Dasar Harga Berlaku

Komponen	2008	2009	2010*	2011**
1. Konsumsi Rumah Tangga	255,62	315,48	352,11	383,03
1.1 Makanan	303,78	380,56	412,35	444,49
1.2 Non Makanan	191,52	228,87	271,94	301,22
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	636,07	640,61	614,53	661,34
3. Konsumsi Pemerintah	245,03	280,77	312,61	341,33
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	346,36	329,49	370,31	402,86
5. Perubahan Inventori	249,66	318,98	354,89	380,50
6. Net Ekspor	56,37	149,45	152,93	153,54
PDRB	281,31	314,48	350,11	380,81

*) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Tabel F
Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Barat Menurut Penggunaan
Atas Dasar Harga Konstan 2000

Komponen	2008	2009	2010*	2011**
1. Konsumsi Rumah Tangga	121,85	131,00	140,00	148,75
1.1 Makanan	143,84	156,03	165,34	174,32
1.2 Non Makanan	92,58	97,69	106,27	114,71
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	254,29	250,50	233,07	241,87
3. Konsumsi Pemerintah	127,38	135,46	139,59	144,80
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	154,96	154,93	162,04	169,93
5. Perubahan Inventori	105,61	123,27	135,58	145,36
6. Net Ekspor	50,28	64,64	79,46	86,97
PDRB	132,86	139,51	146,62	154,30

*) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Tabel G
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Barat Menurut Penggunaan
Aatas Dasar Harga Berlaku

Komponen	2008	2009	2010*	2011**
1. Konsumsi Rumah Tangga	21,86	23,42	11,61	8,78
1.1 Makanan	21,52	25,27	8,35	7,79
1.2 Non Makanan	22,59	19,50	18,82	10,77
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	0,21	0,71	-4,07	7,62
3. Konsumsi Pemerintah	15,30	14,59	11,34	9,19
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	14,08	-4,87	12,39	8,79
5. Perubahan Inventori	23,02	27,77	11,26	7,22
6. Net Ekspor	3,64	165,14	2,33	0,40
PDRB	17,25	11,79	11,33	8,77

*) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Tabel H
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Barat Menurut Penggunaan
Atas Dasar Harga Konstan 2000
(Persen)

Komponen	2008	2009	2010*	2011**
1. Konsumsi Rumah Tangga	7,86	7,51	6,87	6,25
1.1 Makanan	7,47	8,48	5,96	5,43
1.2 Non Makanan	8,69	5,52	8,78	7,94
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	-19,99	-1,49	-6,96	3,78
3. Konsumsi Pemerintah	3,91	6,34	3,05	3,73
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,90	-0,02	4,59	4,87
5. Perubahan Inventori	11,71	16,72	9,98	7,21
6. Net Ekspor	15,73	28,55	22,93	9,46
PDRB	5,46	5,00	5,09	5,24

*) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Tabel I
Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Barat Menurut Penggunaan

Komponen	2008	2009	2010*	2011**
1. Konsumsi Rumah Tangga	209,78	240,82	251,51	257,50
1.1 Makanan	211,19	243,90	249,40	254,99
1.2 Non Makanan	206,87	234,27	255,89	262,59
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	250,14	255,73	263,67	273,42
3. Konsumsi Pemerintah	192,36	207,28	223,95	235,73
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	223,52	212,67	228,53	237,08
5. Perubahan Inventori	236,40	258,77	261,76	261,77
6. Net Ekspor	112,10	231,22	192,46	176,54
PDRB	211,73	225,41	238,79	246,80

*) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Tabel J
Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Barat Menurut Penggunaan
(Persen)

Komponen	2008	2009	2010*	2011**
1. Konsumsi Rumah Tangga	12,98	14,79	4,44	2,38
1.1 Makanan	13,08	15,49	2,25	2,24
1.2 Non Makanan	12,79	13,25	9,23	2,62
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	25,25	2,24	3,10	3,70
3. Konsumsi Pemerintah	10,96	7,76	8,04	5,26
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	8,76	-4,85	7,46	3,74
5. Perubahan Inventori	10,13	9,46	1,16	0,00
6. Net Ekspor	14,34	106,26	-16,76	-8,27
PDRB	11,18	6,46	5,93	3,35

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Tabel K
Pendapatan Regional dan Angka Perkapita Kabupaten Aceh Barat Atas Dasar Harga Berlaku

RINCIAN	2008	2009	2010*	2011**
1. PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (JUTA Rp)	2 415 404,51	2 700 234,68	3 006 210,41	3 269 784,66
2. PENYUSUTAN (JUTA Rp)	69 726,70	82 631,85	91 918,72	100 718,56
3. PDRN ATAS DASAR HARGA BERLAKU (JUTA Rp)	2 345 677,81	2 617 602,83	2 914 291,68	3 169 066,10
4. PAJAK TIDAK LANGSUNG NETO (JUTA Rp)	74 207,77	87 942,58	89 161,16	97 686,93
5. PDRN ATAS DASAR BIAYA FAKTOR (JUTA Rp)	2 271 470,04	2 529 660,25	2 825 130,52	3 071 379,17
6. JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN (JIWA)	164 360	169 111	173 558	177 532
7. PDRB PER KAPITA (Rp)	14 695 817,17	15 967 232,62	17 321 070,80	18 418 001,62
8. PENDAPATAN REGIONAL PER KAPITA (Rp)	13 820 090,29	14 958 579,00	16 277 731,50	17 300 425,65

*) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Tabel L
Pendapatan Regional dan Angka Perkapita Kabupaten Aceh Barat
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

RINCIAN	2008	2009	2010*	2011**
1. PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 (JUTA Rp)	1 140 817,36	1 197 904,53	1 258 936,75	1 324 894,54
2. PENYUSUTAN (JUTA Rp)	23 808,79	25 415,50	26 756,03	28 335,27
3. PDRN ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 (JUTA Rp)	1 117 008,57	1 172 489,03	1 232 180,72	1 296 559,27
4. PAJAK TIDAK LANGSUNG NETO (JUTA Rp)	36 143,73	38 582,35	39 530,27	41 532,50
5. PDRN ATAS DASAR BIAYA FAKTOR (JUTA Rp)	1 080 864,84	1 133 906,68	1 192 650,46	1 255 026,77
6. JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN (JIWA)	164 360	169 111	173 558	177 532
7. PDRB PER KAPITA (Rp)	6 940 967,13	7 083 539,99	7 253 694,74	7 462 849,18
8. PENDAPATAN REGIONAL PER KAPITA (Rp)	6 576 203,69	6 705 103,04	6 871 768,84	7 069 298,86

*) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Tabel M
Laju Pertumbuhan Pendapatan Regional dan Angka Perkapita Kabupaten Aceh Barat
Atas Dasar Harga Berlaku

RINCIAN	2008	2009	2010*	2011**
1. PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (PERSEN)	17,25	11,79	11,33	8,77
2. PENYUSUTAN (PERSEN)	13,53	18,51	11,24	9,57
3. PDRN ATAS DASAR HARGA BERLAKU (PERSEN)	17,37	11,59	11,33	8,74
4. PAJAK TIDAK LANGSUNG NETO (PERSEN)	13,53	18,51	1,39	9,56
5. PDRN ATAS DASAR BIAYA FAKTOR (PERSEN)	17,50	11,37	11,68	8,72
6. JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN (PERSEN)	2,91	2,89	2,63	2,29
7. PDRB PER KAPITA (PERSEN)	13,94	8,65	8,48	6,33
8. PENDAPATAN REGIONAL PER KAPITA (PERSEN)	14,17	8,24	8,82	6,28

*) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Tabel N
Laju Pertumbuhan Pendapatan Regional dan Angka Perkapita Kabupaten Aceh Barat
Atas Dasar Harga Konstan 2000

RINCIAN	2008	2009	2010*	2011**
1. PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 (PERSEN)	5,46	5,00	5,09	5,24
2. PENYUSUTAN (PERSEN)	5,97	6,75	5,27	5,90
3. PDRN ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 (PERSEN)	5,45	4,97	5,09	5,22
4. PAJAK TIDAK LANGSUNG NETO (PERSEN)	5,97	6,75	2,46	5,07
5. PDRN ATAS DASAR BIAYA FAKTOR (PERSEN)	5,43	4,91	5,18	5,23
6. JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN (PERSEN)	2,91	2,89	2,63	2,29
7. PDRB PER KAPITA (PERSEN)	2,48	2,05	2,40	2,88
8. PENDAPATAN REGIONAL PER KAPITA (PERSEN)	2,45	1,96	2,49	2,87

*) Angka sementara **) Angka sangat sementara